



**PENGARUH AGLOMERASI, MIGRASI PENDUDUK,
KETIMPANGAN PENDIDIKAN, DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUMAS**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh
Mentari Oktavia Widyawati
NIM 7101413222**

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017**

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Senin
Tanggal : 24 Juli 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi



Adi Rustiana
NIP. 196801021992031002

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Kardoyo", is written over the printed name and NIP number.

Dr. Kardoyo, M.Pd
NIP. 196205291986011001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 14 Agustus 2017

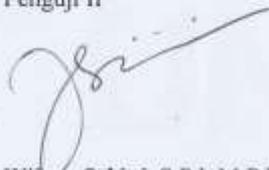
Penguji I



Dr. Widiyanto, MBA, M.M

NIP.196302081998031001

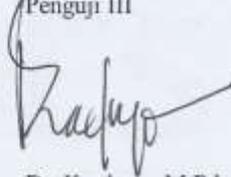
Penguji II



Wijang Sakitri, S.Pd, M.Pd

NIP. 198108262010122005

Penguji III



Dr. Kardoyo, M.Pd

NIP.196205291986011001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Widyono, M.M

NIP.195601031983121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mentari Oktavia Widyawati

NIM : 7101413222

Tempat Tanggal Lahir: Banyumas, 18 Oktober 1995

Alamat :Desa Sidamulya Rt 02 Rw 02 Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas

menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Juli 2017

UNN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


Mentari Oktavia W
NIM. 7101413222

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- ❖ Persebaran industri yang merata akan mengurangi ketidakmerataan pendapatan pada suatu daerah
- ❖ Pemerataan pendidikan yang baik akan mengurangi ketidakmerataan pendapatan disuatu daerah
- ❖ Penduduk yang bekerja diluar daerah menimbulkan perbedaan pendapatan penduduk disuatu daerah
- ❖ Pertumbuhan ekonomi yang merata dapat mengurangi ketimpangan pendapatan disuatu daerah

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- ❖ Almamaterku, Universitas Negeri Semarang

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat diberikan kelancaran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Aglomerasi, Migrasi, Ketimpangan Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas”.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Selama penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak kendala yang dihadapi, namun berkat dukungan serta motivasi dari semua pihak akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini perkenankan penyusun menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Wahyono, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik.
3. Dr. Ade Rustiana, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
4. Dr. Kardoyo, M.Pd., Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama pembuatan proposal penelitian sampai terselesaikannya skripsi ini.

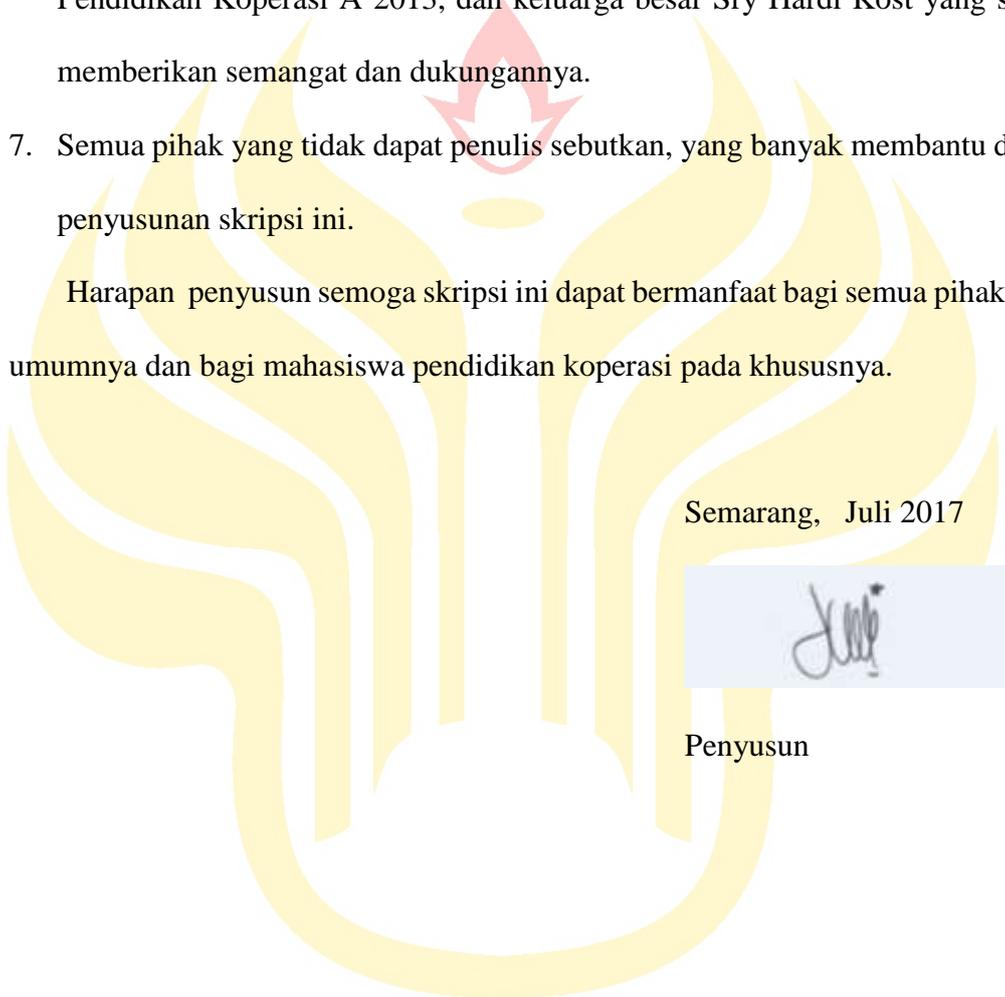
5. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas segala dukungan dan doanya.
6. Teman-teman tercinta Fitria, Atus, Eli, Cipta, Anis, Fitri, keluarga besar Pendidikan Koperasi A 2013, dan keluarga besar Sry Hardi Kost yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan bagi mahasiswa pendidikan koperasi pada khususnya.

Semarang, Juli 2017



Penyusun



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Oktavia, Mentari. 2017. “Pengaruh Aglomerasi, Migrasi, Ketimpangan Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Kardoyo, M.Pd.

Kata kunci : Aglomerasi, Migrasi, Ketimpangan Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan,

Ketimpangan pendapatan merupakan satu masalah pembangunan yang sering dihadapi oleh daerah yang masih berkembang. Ketimpangan yang tinggi akan menimbulkan permasalahan ekonomi yang lainnya seperti kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Aglomerasi, Migrasi, Ketimpangan Pendidikan, Pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan Pendapatan

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kecamatan di kabupaten Banyumas yang berjumlah 27 kecamatan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Metode yang di gunakan adalah mix metode. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif presentase, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian diperoleh analisis deksriptif rata-rata aglomerasi sebesar 0,516 ini menunjukkan bahwa variabel Aglomerasi memiliki tingkat yang sedang, Migrasi 0,30 memiliki tingkat migrasi rendah, Ketimpangan Pendidikan 0,22 memiliki tingkat rendah, Pertumbuhan ekonomi 0,15 memiliki tingkat rendah, ketimpangan pendapatan 0,27 memiliki tingkat rendah. Hasil uji hipotesis diperoleh bahwa ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel aglomerasi, migrasi, ketimpangan pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dimana besar pengaruhnya adalah 83,7 % dan sisanya 16,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model.

Secara parsial pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan pendapatan sebesar 36,1%, pengaruh migrasi terhadap ketimpangan pendapatan sebesar 20,7%, pengaruh ketimpangan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan sebesar 41,1%, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan sebesar 19,14%. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh paling kecil karena pertumbuhan ekonomi sudah dirasakan oleh semua daerah. Ketimpangan pendidikan memiliki pengaruh yang paling besar karena pendidikan dianggap memiliki korelasi positif terhadap pendapatan.

Saran yang dapat disampaikan adalah pemerintah kecamatan perlu meninjau kembali persebaran industri didaerahnya, penyediaan fasilitas yang dibutuhkan penduduk berupa pendidikan dan lapangan pekerjaan Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan pendidikan seperti peninjauan lokasi sekolah di suatu daerah agar tidak terjadi perbedaan pendidikan antar daerah.

ABSTRACT

Oktavia, Mentari. 2017. "The Influence of Agglomeration, Migration, Education Inequality, and Economic Growth towards Income Inequality Inter-District in Banyumas Regency". Final Project. Department of Economics, Faculty of Economics, Universitas Negeri Semarang. Advisor Dr.Kardoyo, M.Pd.

Keywords: Agglomeration, Migration, Education Inequality, Economic Growth, and Income Inequality.

Income inequality is a development problem which often faced by developing regions. The high inequality causes other economic problems such as poverty. This research aims to analyze income inequality and the influence of Agglomeration, Migration, Education Inequality, and Economic Growth towards income Inequality.

The population in this research was the entire districts in Banyumas Regency which were 27 districts. The sampling technique used in this research was saturated sample. The method used mix method. The data collecting method used documentation and interview method. The data collected was analyzed by using percentage descriptive statistics technique, classical assumption test, and multiple linear regression analysis.

The result of the research obtained that descriptive statistics for the mean of agglomeration is 0.516. It shows that Agglomeration variable is in moderate level. Low level migration is 0,30, low level educational inequality is 0,22, low level economic growth is 0,15, low level income inequality is 0,27. The hypothesis result shows that there is simultaneously influence of agglomeration, migration, education inequality, and economic growth toward income inequality which the biggest influence is 83.7% then rest is 16.3% and it is influenced by other variables outside the model.

Partially, the influence of agglomeration toward income inequality is 36.1%, the influence of migration toward income inequality is 20.7%, the influence of education inequality toward income inequality is 41.1%, and the influence of economic growth toward income inequality is 19.14%. Economic growth has the smallest influence because it has been experienced by all regions. Education inequality has the biggest because it is considered to positively correlate to income.

Suggestion is the district government should review the distribution of industries in its region, provide facilities needed by community including education and employment, and give policies that has orientation to education equality such as observation of schools in a region in order not to differentiate education inter-district.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	16
1.3 Cakupan Masalah.....	17
1.4 Perumusan Masalah	17
1.5 Tujuan Penelitian	18
1.6 Kegunaan Penelitian	19
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	19
1.6.2. Manfaat Praktis	19
1.7 Orisinalitas Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 . Kajian Teori Utama (<i>GrandTheory</i>)	22
2.2 Kajian Variabel Penelitian	24
2.2.1 Ketimpangan Pendapatan.....	24
2.2.1.1. Ukuran Ketimpangan.....	26
2.2.1.1.1. Indeks Gini.....	26
2.2.1.1.2. Kurva Lorenz	26
2.2.1.1.3. Indeks Wiliamson	27
2.2.1.1.4. Indeks Entropy Theil.....	28

2.2.1.1.5. Tipologi Klasen.....	29
2.2.1.2. Tren Distribusi Pendapatan	30
2.2.1.3. Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan	33
2.2.1.4. Dampak Ketimpangan	38
2.2.1.5. Penanggulangan Ketimpangan	39
2.2.2. Pertumbuhan ekonomi.....	41
2.2.2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik	42
2.2.2.2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik	42
2.2.2.3. Teori Geografi Ekonomi Baru.....	43
2.2.2.4. Teori Pertumbuhan Harod-Domar.....	44
2.2.3. Aglomerasi.....	45
2.2.3.1. Aglomerasi Klasik	47
2.2.3.2. Aglomerasi Modern.....	48
2.2.3.3. Ukuran Aglomerasi	49
2.2.3.4. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Aglomerasi	50
2.2.4. Migrasi Penduduk.....	50
2.2.4.1. Bentuk- Bentuk Migrasi	51
2.2.4.2. Faktor- Faktor Penyebab Migrasi	52
2.2.4.3. Karakteristik Pelaku Migrasi	55
2.2.4.4. Jenis-Jenis Migrasi.....	57
2.2.4.5. Ukuran-Ukuran Migrasi	58
2.2.5. Pendidikan	60
2.2.5.1. Ketimpangan Pendidikan	61
2.3. Penelitian Terdahulu.....	65
2.4. Kerangka Berfikir.....	70
2.5. Hipotesis Penelitian.....	70
BAB III METODE PENELITIAN.....	73
3.1. Jenis dan Desain Penelitian	73
3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	74
3.2.1. Populasi.....	74
3.2.2. Sampel.....	74

3.3. Variabel.....	74
3.3.1 Variabel Independent	75
3.3.2. Variabel Dependent.....	76
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	76
3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	77
3.5.1. Teknik Analisis Data Kuantitatif	77
3.5.1.1 Analisis Deskriptif	77
3.5.1. 2 Analisis Regresi Linear	78
3.5.2. Teknik Analisis Data Kualitatif	78
3.6. Uji Prasyarat Analisis.....	79
3.6.1. Uji Normalitas.....	79
3.6.2. Uji Multikolinieritas	79
3.6.3. Uji Heteroskedastisitas.....	80
3.7. Uji Hipotesis Penelitian	80
3.7.1. Uji t	80
3.7.2. Uji F	80
3.7.3. Uji R^2	81
3.7.4. Uji r^2	81
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	83
4.1 Hasil Penelitian	83
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif	83
4.1.2 Uji Prasyarat Analisis.....	87
4.1.2.1 Uji Normalitas	87
4.1.2.2 Uji Multikolinearitas.....	88
4.1.2.3. Uji Heterokedastisitas.....	89
4.1.3. Hasil Analisis Regresi Berganda.....	90
4.1.4. Hasil Uji Hipotesis	92
4.1.4.1 Pengaruh Aglomerasi, Migrasi, Ketimpangan Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan ...	92
4.1.4.2 Pengaruh Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan	94
4.1.4.3 Pengaruh Migrasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	96

4.1.4.4 Pengaruh Ketimpangan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	96
4.1.4.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	97
4.1.5 Penyebab Variabel Memiliki Pengaruh Terbesar dan Terendah	97
4.1.5.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan.....	98
4.1.5.2. Ketimpangan Pendidikan dan Ketimpangan Pendapatan .	104
4.2. Pembahasan.....	112
4.2.1. Pengaruh Aglomerasi, Migrasi Penduduk, Ketimpangan Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan	112
4.2.2. Pengaruh Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan	112
4.2.3. Pengaruh Migrasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan	113
4.2.4. Pengaruh Ketimpangan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	113
4.2.5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan	114
BAB V PENUTUP	116
5.1 Simpulan.....	116
5.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	123

DAFTAR TABEL

1.1. Tabel tentang Sumber Daya Alam	5
1.2. Tabel tentang Kondisi Pendidikan	6
1.3. Tabel tentang Alokasi Investasi	7
1.4. Tabel Migrasi Penduduk	9
1.5. Tabel Pengelompokan Industri	10
1.6. Tabel Kondisi Infrastruktur Jalan	12
1.7. Tabel PDRB Per Kapita	15
2.1. Tabel Tipologi Klassen.....	30
4.1. Deskriptif Data Ketimpangan Pendapatan	83
4.2. Deskriptif Data Aglomerasi	84
4.3. Deskriptif Data Migrasi Penduduk	85
4.4. Deskriptif Data Ketimpangan Pendidikan	85
4.5. Deskriptif Data Pertumbuhan Ekonomi	86
4.6. Hasil Uji Statistik Non Parametrik Kolmogorov-Smirnov	88
4.7. Hasil Uji Multikolinearitas	89
4.8. Hasil Uji Heterokedastisitas	90
4.9. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	91
4.10. Hasil Uji F	93
4.11 Hasil Uji R^2	94
4.12. Hasil Uji t	94
4.13. Hasil Uji r^2	95
4.14. PDRB Per Kapita Tiap Kecamatan	99
4.15. Pendidikan Penduduk.....	105

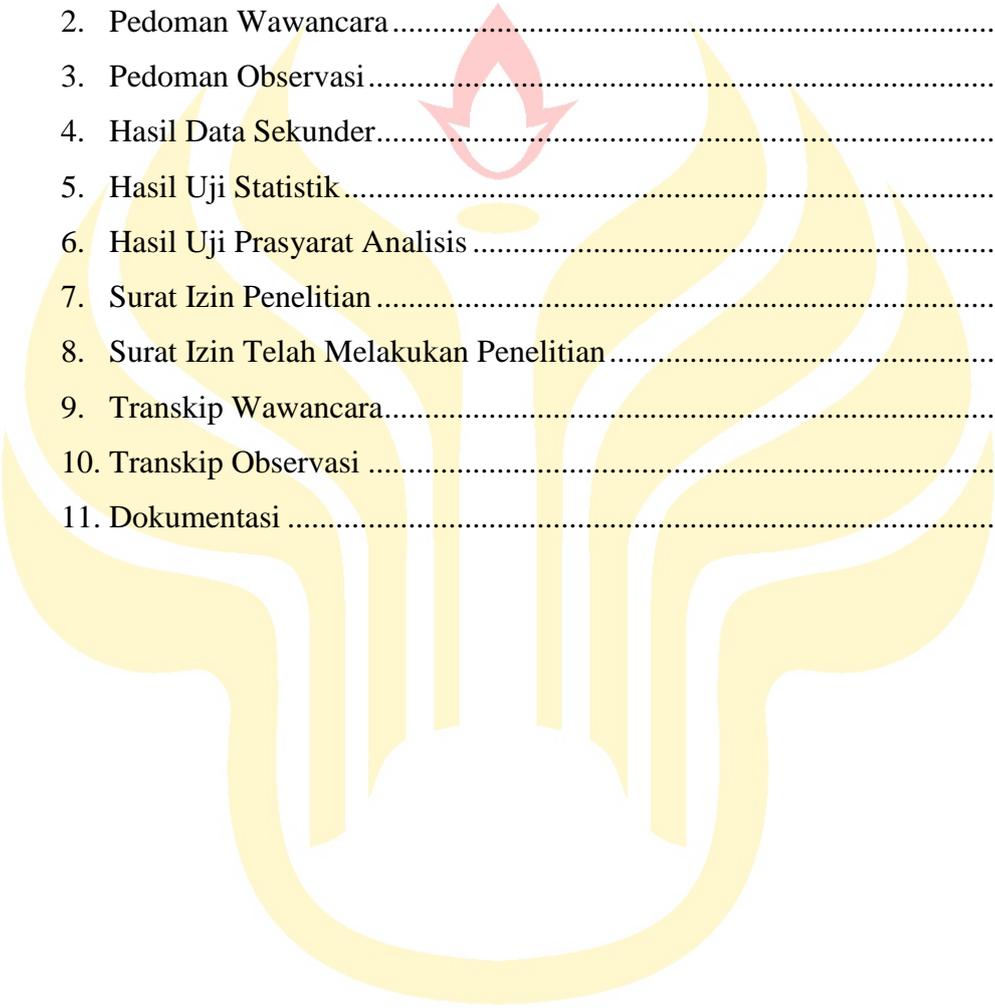
DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Tingkat Indeks Gini 5 Tahun Terakhir.....	2
2.1. Gambar Kurva Lorenz	27
2.2. Gambar Skema Migrasi	5
2.3. Kerangka Berfikir	70
4.1. Normal Probability Plot Hasil Uji Normalitas	87
4.2. Kondisi Pertokoan Kecamatan Patikraja.....	100
4.3. Kondisi Jalan Kecamatan Patikraja.....	101
4.4. Industri Kecap Damai	102
4.5. Hotel Dominic.....	102
4.6. Kondisi Pertokoan Purwokerto Timur	103
4.7. SMP N 1 Lumbir Tampak Depan	106
4.8. SMP N 1 Lumbir Tampak Dalam	107
4.9. Jalan Menuju SMP N 1 Lumbir	108
4.10. Ruangan SMP 4 Purwokerto.....	109
4.11. SMP Burderan Purwokerto Tampak Depan.....	110
4.12. SMK Wiworotomo Tampak Depan	110

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kisi- Kisi Instrumen Penelitian.....	124
2. Pedoman Wawancara.....	126
3. Pedoman Observasi.....	129
4. Hasil Data Sekunder.....	130
5. Hasil Uji Statistik.....	131
6. Hasil Uji Prasyarat Analisis.....	132
7. Surat Izin Penelitian.....	133
8. Surat Izin Telah Melakukan Penelitian.....	134
9. Transkrip Wawancara.....	137
10. Transkrip Observasi.....	156
11. Dokumentasi.....	164

A large, faint watermark of the UNNES logo is centered on the page. It features a stylized yellow flame-like shape above a white circular base, with a red flame-like shape above it. The logo is partially obscured by the text of the table of contents.

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

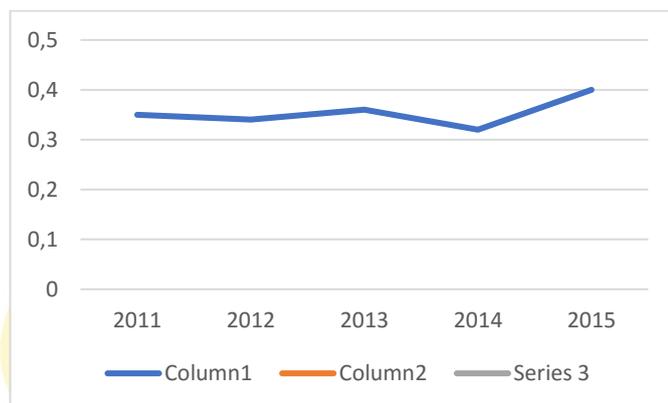
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah besar yang pada umumnya dihadapi oleh negara atau daerah yang masih berkembang salah satunya adalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan menggambarkan bahwa tingkat distribusi di setiap pendapatan daerah memiliki tingkat yang berbeda-beda. Ketimpangan pendapatan mengakibatkan berbagai masalah lain yang timbul di antaranya adalah kemiskinan. Hal tersebut terjadi karena distribusi pendapatan hanya dinikmati oleh kaum kaya saja. Ketimpangan distribusi pendapatan diukur oleh nilai *gini coefficient* dimana dibantu oleh kurva *Lorenz* (Todaro,2004).

Banyumas adalah salah satu kabupaten yang memiliki masalah yang cukup serius.Salah satu masalah yang dihadapi adalah ketimpangan distribusi pendapatan dimana distribusi pendapatan hanya dirasakan di daerah perkotaan saja. Kabupaten Banyumas 5 tahun terakhir memiliki nilai koefisien gini cukup tinggi dimana tahun 2015 memiliki koefisien gini tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Perubahan koefisien gini di Kabupaten Banyumas selama 5 tahun terakhir bisa kita lihat pada gambar di bawah ini:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Gambar 1.1. Indeks gini kabupaten Banyumas

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah ,2012-2016

Dari grafik di atas kita bisa melihat bahwa ketimpangan pendapatan yang diukur dari koefisien gini menggambarkan pendistribusian pendapatan di Kabupaten Banyumas tidak merata atau timpang. Kabupaten Banyumas termasuk dalam kabupaten yang masih berkembang padahal pada teorinya ketimpangan pendapatan akan semakin tinggi pada wilayah yang sedang dalam puncak pembangunan hal tersebut bisa dilihat dari pendapatan per kapita penduduknya. Kabupaten Banyumas memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah dibanding dengan kabupaten lainnya misalnya adalah : Kota Semarang dimana PDRBnya adalah 102.301 PDRB tersebut paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah namun, ketimpangan di Kota Semarang lebih rendah dibanding Kabupaten Banyumas yaitu 0,33.

Berdasarkan teori ketimpangan pendapatan seharusnya daerah yang memiliki pendapatan yang tinggi karena ketimpangan akan mencapai puncaknya pada daerah yang sedang mengalami puncak pembangunan. Namun, berbeda

dengan Kabupaten Banyumas yang masih dalam perkembangan pembangunan memiliki indeks ketimpangan yang cukup tinggi yaitu 0,46.

Ketimpangan pendapatan bisa dikarenakan oleh beberapa faktor baik faktor internal maupun eksternal dari daerah itu sendiri. Ketimpangan pendapatan di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah : konsentrasi kegiatan ekonomi, SDA, mobilitas faktor produksi dan jasa, perbedaan demografis, alokasi investasi, dan kurang lancarnya perdagangan. Faktor sumber daya alam merupakan salah satu faktor yang dianggap memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Sumber daya alam diyakini memiliki pengaruh dalam ketimpangan di karenakan dengan banyaknya suatu daerah yang memiliki sumber daya alam maka, semakin besar potensi ekonomi daerah tersebut. Namun, sumber daya alam saja tidak cukup dalam memajukan ekonomi suatu daerah namun, harus dibarengi dengan sumber daya manusia yang bagus pula.

Faktor yang selanjutnya adalah mobilitas faktor produksi. Mobilitas disini termasuk dalam migrasi dan transmigrasi. Migrasi dianggap memiliki pengaruh karena dengan lancarnya mobilitas tenaga kerja maka, suatu daerah tidak akan mengalami kekurangan atau kelebihan sehingga, bisa mengisi satu sama lain. Faktor yang berikutnya adalah kondisi demografis. Kondisi ini meliputi keadaan pendidikan, kesehatan dan etos kerja penduduk. Hal tersebut dianggap memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan karena, dengan kualitas penduduk yang baik maka, akan meningkatkan pendapatan mereka dibanding dengan penduduk yang memiliki kualitas yang rendah.

Faktor berikutnya adalah kurang lancarnya perdagangan. Kurang lancarnya perdagangan bisa disebabkan oleh beberapa hal di antaranya adalah karena sarana dan prasarana termasuk infrastruktur jalan. Dengan infrastruktur jalan yang tidak bagus maka, barang-barang tidak dapat didistribusikan dengan baik sehingga, penduduk tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi. Dimana hal tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatannya.

Faktor yang terakhir adalah konsentrasi kegiatan ekonomi. Dengan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi disuatu daerah maka, akan membuat perbedaan aktivitas ekonomi. Daerah yang dekat dengan daerah konsentrasi akan lebih baik kehidupannya dengan daerah yang jauh dari konsentrasi. Hal tersebut terjadi karena, konsentrasi kegiatan ekonomi akan berpengaruh terhadap pendapatan penduduk disekitarnya.

Seperti daerah lain, Kabupaten Banyumas juga memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Namun, sebelum mengetahui faktor apa saja yang diprediksi dapat mempengaruhi pendapatan kita bisa melihat data- data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Mulai dari sumber daya alam, kondisi demografis, alokasi investasi, kondisi demografis, kurang lancarnya perdagangan, konsentrasi kegiatan ekonomi.

Kondisi sumber daya alam di Kabupaten Banyumas rata-rata memiliki sumber daya alam yang sama karena kondisi struktur tanah dan batumannya sama hal tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Sumber Daya Alam

No	Kecamatan	SDA
1	Lumbir	Basalt dan emas
2	Wangon	Basalt & Tanah urug
3	Jatilawang	Basalt
4	Rawalo	Basalt
5	Kebasen	Basalt & Tanah urug
6	Kemranjen	Basalt
7	Sumpiuh	-
8	Tambak	Basalt
9	Somagede	Basalt
10	Kalibagor	Kaolin
11	Banyumas	Tanah urug, pasir & Basalt
12	Patikraja	Andesit
13	Purwojati	Diorit
14	Ajibarang	Andesit ,Batu gamping,phospat,Tanah urug,Kalsit,Diorit
15	Gumelar	Andesit, Kalsit, Emas
16	Pekuncen	Batu Rai& Andesit
17	Cilongok	Andesit,Kaolin,Tanah Urug
18	Karanglewas	-
19	Kedungbanteng	Andesit, Andesit Hornblende,Granodiorit,Batu Rai , Tras, Oker
20	Baturaden	Andesit
21	Sumbang	-
22	Kembaran	Tanah liat
23	Sokaraja	Tanah liat
24	Purwokerto selatan	-
25	Purwokerto barat	-
26	Purwokerto timur	-
27	Purwokerto utara	-
	Jumlah	

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2016

Faktor yang selanjutnya adalah kondisi demografis. Kondisi demografis ini dilihat dari kondisi pendidikan. Perbedaan kondisi pendidikan bisa kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Kondisi Pendidikan Di Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Tidak Tamat SD	SD	SMP	SMA	Universitas
1	Lumbir	13.255	21.313	3927	1806	290
2	Wangon	29.509	20.834	8910	7212	2178
3	Jatilawang	14.845	23.327	7009	7899	659
4	Rawalo	7712	17.136	10.712	6853	428
5	Kebasen	12.517	12.408	17.596	3168	6769
6	Kemranjen	20.349	22.111	9.586	6318	1445
7	Sumpiuh	6.847	21.941	10.435	6.704	1.267
8	Tambak	6.230	14.071	8.106	9.797	775
9	Somagede	9.189	12.900	4.677	2.641	701
10	Kalibagor	14.306	11.131	7.432	9.909	1.207
11	Banyumas	3.770	22.213	8.522	6.657	1.381
12	Patikraja	14.126	20.426	7236	5.938	1.183
13	Purwojati	9.701	12.222	4.611	2.015	522
14	Ajibarang	21.815	39.559	13.843	9.050	2.152
15	Gumelar	10.158	17.463	7.810	5.902	1.192
16	Pekuncen	14.562	31.294	7.630	6.068	992
17	Cilongok	47.406	26.343	15.802	13.277	2.528
18	Karanglewas	8.867	23.508	13.048	8113	2609
19	Kedungbanteng	17.848	21.000	5.281	4.475	648
20	Baturaden	12.938	15.896	7.148	7.698	2.567
21	Sumbang	23.518	12.385	9.880	3.907	23.673
22	Kembaran	16.660	25.718	11.957	13.819	4.404
23	Sokaraja	18.011	23.269	13.308	16.799	4.726
24	Purwokerto Selatan	17.079	21.690	12.826	11.781	5988
25	Purwokerto Barat	8.137	11.594	8.880	13.931	5219
26	Purwokerto Timur	17.079	21.690	12.826	11.781	5.998
27	Purwokerto Utara	8.146	18.462	8.105	20.452	3.913

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2016

Faktor yang selanjutnya adalah alokasi investasi hal ini dilihat dari pendirian hotel di Kabupaten Banyumas. Kondisi tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Kondisi Alokasi Investasi Pada Sektor Jasa

No	Kecamatan	Hotel Bintang	Hotel Non Bintang	Jumlah
1	Lumbir	-	-	
2	Wangon	-	5	5
3	Jatilawang	-	1	1
4	Rawalo	-	2	2
5	Kebasen	-	1	1
6	Kemranjen	-	2	2
7	Sumpiuh	-	1	1
8	Tambak	-	-	-
9	Somagede	-	-	-
10	Kalibagor	-	-	-
11	Banyumas	-	1	1
12	Patikraja	-	-	-
13	Purwojati	-	-	-
14	Ajibarang	1	4	5
15	Gumelar	-	-	-
16	Pekuncen	-	-	-
17	Cilongok	-	8	8
18	Karanglewas	-	1	1
19	Kedungbanteng	-	1	1
20	Baturaden	3	113	116
21	Sumbang	-	-	-
22	Kembaran	-	-	-
23	Sokaraja	1	1	2
24	Purwokerto selatan	2	22	24
25	Purwokerto barat	1	8	9
26	Purwokerto timur	2	16	18
27	Purwokerto utara	-	2	2
	Jumlah	10	189	199

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Faktor yang selanjutnya adalah mobilitas faktor produksi barang dan jasa termasuk migrasi dan transmigrasi. Di Kabupaten Banyumas untuk migrasi bisa dilihat pada tabel 1.4. Dari tabel 1.4 kita bisa melihat bahwa daerah yang memiliki

jumlah migrasi yang tinggi adalah Kecamatan Cilongok sedangkan yang memiliki jumlah migrasi yang rendah adalah Kecamatan Lumbir. Lumbir adalah salah satu kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas. Migrasi diprediksi menjadi faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena, akan ada perbedaan yang terlihat antara penduduk yang bekerja di daerah sendiri dan di daerah lain.

Dengan banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan karena alasan mencari pekerjaan akan menimbulkan dampak yang negatif bagi daerah yang ditinggalkan yaitu Kabupaten Banyumas. Dampak dari banyaknya penduduk yang mencari kerja di daerah lain adalah ketertinggalan daerah karena memiliki tenaga kerja produktif yang sedikit. Dengan sedikitnya tenaga kerja yang produktif maka, akan sedikit pula produktivitas yang dihasilkan. Hal tersebut yang akan menjadi salah satu penyebab perbedaan pendapatan.

Tabel 1.4
Migrasi penduduk di Kabupaten Banyumas

KEPINDAHAN				
NO	KECAMATAN	L	P	JML
1	Lumbir	135	146	281
2	Wangon	375	289	664
3	Jatilawang	205	226	431
4	Rawalo	236	202	438
5	Kebasen	188	195	383
6	Kemranjen	266	259	525
7	Sumpiuh	205	206	411
8	Tambak	158	211	369
9	Somagede	178	129	307
10	Kalibagor	295	247	542
11	Banyumas	214	184	398
12	Patikraja	496	419	915
13	Purwojati	107	125	232
14	Ajiabarang	563	479	1.042
15	Gumelar	241	182	423
16	Pekuncen	382	359	741
17	Cilongok	654	625	1.279
18	Karanglewas	280	244	524
19	Sokaraja	487	442	929
20	Kembaran	348	326	674
21	Sumbang	458	362	820
22	Baturraden	317	326	643
23	Kedungbanteng	251	188	439
24	Purwokerto Selatan	416	467	883
25	Purwokerto Barat	483	440	923
26	Purwokerto Timur	429	442	871
27	Purwokerto Utara	291	267	558
	JUMLAH	8.658	7.987	16.645

Sumber : Dindukcapil Banyumas ,2016

Faktor yang selanjutnya adalah konsentrasi kegiatan ekonomi. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5
Tabel Pengelompokan Industri di Kabupaten Banyumas

NO	Kecamatan	Industri besar	Industri menengah	Industri kecil
1	Lumbir	-	-	4
2	Wangon	-	-	8
3	Jatilawang	-	-	3
4	Rawalo	-	-	6
5	Kebasen	-	-	7
6	Kemranjen	-	3	6
7	Sumpiuh	-	-	5
8	Tambak	-	-	5
9	Somagede	-	-	1
10	Kalibagor	-	2	3
11	Banyumas	-	4	10
12	Patikraja	-	2	12
13	Purwojati	-	2	3
14	Ajibarang	-	5	34
15	Gumelar	-	1	1
16	Pekuncen	-	3	3
17	Cilongok	-	3	28
18	Karanglewas	-	1	11
19	Kedungbanteng	-	1	10
20	Baturaden	-	4	14
21	Sumbang	-	3	5
22	Kembaran	-	3	20
23	Sokaraja	1	5	26
24	Purwokerto selatan	2	18	85
25	Purwokerto barat	1	12	41
26	Purwokerto timur	-	28	66
27	Purwokerto utara	1	13	34
Jumlah		5	118	451

Sumber: BPS Banyumas, 2016

Dari tabel di atas kita bisa melihat bahwa industri-industri besar yang mampu menopang kegiatan ekonomi berada di wilayah perkotaan saja yaitu terletak di Kecamatan Purwokerto Selatan dengan sektor industri besar berjumlah 2 industri besar, 16 industri sedang dan 85 industri kecil sedangkan untuk kecamatan yang tidak memiliki industri besar dan sedang adalah kecamatan yang

jauh dari pusat perkotaan yaitu Lumir, Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Sumpiuh, Tambak, Somagede.

Kabupaten Banyumas yang merupakan kabupaten yang masih berkembang mengalami adanya aglomerasi atau pengelompokan sektor industri. Sektor industri besar yang mampu menopang kegiatan ekonomi di suatu daerah hanya terletak di daerah perkotaan saja sehingga efek dari kegiatan ekonomi hanya dapat dirasakan oleh masyarakat perkotaan saja.

Faktor yang terakhir adalah kondisi infrastruktur jalan. Infrastruktur berkaitan dengan kondisi jalan di suatu daerah. Dengan kondisi jalan yang baik maka, proses perdagangan atau kegiatan ekonomi berjalan dengan baik. Namun, ketika infrastruktur jalan tidak baik, maka kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik walaupun berjalan pasti akan terganggu. Kondisi baik atau tidaknya suatu jalan akan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk di sekitarnya.

Ketika infrastruktur bagus maka, transportasi umum bisa melewati dengan baik tanpa kendala hal tersebut membantu dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Untuk Kabupaten Banyumas memiliki rata-rata kondisi jalan yang bagus sehingga, kegiatan ekonomi penduduk tidak terganggu. Kondisi infrastruktur jalan bisa lihat pada tabel 1.6

Tabel 1.6
Kondisi Infrastruktur Jalan

NO	Kecamatan	Kondisi jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak berat
1	Lumbir	23,38	-	3,20	8,85
2	Wangon	15,02	-	6,53	2,00
3	Jatilawang	12,68	0,40	10,44	12,43
4	Rawalo	9,69	-	7,00	3,07
5	Kebasen	20,96	4,29	8,96	1,00
6	Kemranjen	10,25	2,00	8,55	0,50
7	Sumpiuh	27,78	0,70	14,05	0,80
8	Tambak	18,95	-	6,39	0,24
9	Somagede	8,25	2,00	-	1,05
10	Kalibagor	10,50	1,62	3,22	7,80
11	Banyumas	22,23	2,54	9,70	-
12	Patikraja	14,60	-	2,00	1,16
13	Purwojati	31,23	-	13,87	1,00
14	Ajibarang	14,07	0,35	1,33	-
15	Gumelar	28,63	2,57	5,16	2,24
16	Pekuncen	32,75	-	3,50	2,00
17	Cilongok	33,77	4,60	15,07	-
18	Karanglewas	9,23	3,52	4,85	-
19	Kedungbanteng	19,30	5,20	15,71	1,30
20	Baturaden	12,10	2,52	6,15	5,10
21	Sumbang	38,96	4,32	6,00	-
22	Kembaran	4,30	0,50	3,90	-
23	Sokaraja	15,47	7,16	9,81	3,00
24	Purwokerto Selatan	38,96	4,32	6,00	-
25	Purwokerto Barat	21,48	1,55	-	-
26	Purwokerto Timur	30,65	3,10	0,14	-
27	Purwokerto Utara	15,43	1,33	0,72	-
	Jumlah	530,0	53,99	167,25	53,54

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Dalam penelitian ini ada empat variabel yang digunakan, yaitu: aglomerasi, migrasi penduduk, ketimpangan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Aglomerasi merupakan pengelompokan sektor industri pada satu wilayah. Aglomerasi terbentuk karena adanya industri yang mengelompok pada satu

daerah tertentu. Pengelompokan tersebut terjadi karena beberapa alasan yaitu: alasan dekat dengan bahan baku, dekat dengan konsumen atau yang lain. Aglomerasi memiliki keuntungan dan kekurangan untuk perekonomian suatu daerah.

Sjafrizal (2008:135) mengatakan bahwa : “Keuntungan aglomerasi pada dasarnya kekuatan utama dari pusat pertumbuhan. Alasannya karena dia memberikan keuntungan eksternal baik dalam bentuk penurunan biaya atau peningkatan peluang pasar bagi para pengusaha yang beroperasi dalam pusat tersebut”.

Persebaran industri di kabupaten Banyumas dapat kita lihat pada tabel 1.6.

Faktor penyebab ketimpangan yang selanjutnya adalah migrasi penduduk.

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain.

Sjafrizal (2008:119) mengatakan bahwa: “Migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya”.

Migrasi memiliki dampak positif dan negatif baik bagi pelaku maupun bagi daerah. Dampak positif bagi penduduk yang melakukan migrasi untuk bekerja akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik dari daerahnya sedangkan dampak negatifnya adalah penduduk harus bersaing dengan penduduk asli yang ingin bekerja di daerah yang dituju. Dampak positif dari migrasi untuk daerah yang dituju adalah daerah tersebut mendapatkan tambahan tenaga kerja sehingga mereka bisa memilih sesuai dengan keinginan mereka dan negatifnya akan timbul pemukiman kumuh. Kabupaten Banyumas memiliki jumlah penduduk yang melakukan migrasi berbeda-beda jumlahnya untuk setiap kecamatan, hal tersebut bisa dilihat pada tabel 1.4.

Faktor penyebab ketimpangan yang selanjutnya adalah ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan adalah ketidakmerataan pendidikan di

kecamatan-kecamatan di Kabupaten Banyumas. Keadaan pendidikan di satu kecamatan yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan baik secara kualitas maupun kuantitas. Sistem pendidikan di negara berkembang kadang-kadang bukan mengurangi, namun justru memperburuk ketimpangan pendapatan. Alasan utama dari efek buruk pendidikan formal atas distribusi pendapatan adalah adanya korelasi yang positif antara tingkat pendidikan seseorang dengan penghasilan seumur hidup (Todaro, 2006).

Keadaan pendidikan di setiap daerah memiliki keadaan yang berbeda meskipun dalam satu wilayah kabupaten. Perbedaan keadaan setiap daerah disebabkan karena beberapa hal diantaranya karena akses pendidikan yang susah karena lokasi sekolah yang hanya berada di pusat wilayah pemerintahan. Selain lokasi sekolah yang hanya ada di pusat pemerintahan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah juga akan menimbulkan perbedaan kualitas pendidikan di suatu daerah. Perbedaan-perbedaan tersebut yang menimbulkan sebuah masalah berupa masalah ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan bisa dilihat pada tabel 1.2.

Faktor penyebab yang selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berbeda setiap daerah menyebabkan perbedaan pendapatan setiap daerah.

Untuk wilayah kabupaten Banyumas bisa kita lihat pada tabel di bawah ini:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Tabel 1.7
PDRB Per Kapita di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	PDRB SBLM	PDRB SSDH
1	Lumbir	2.421.651	2.749.193
2	Wangon	3.646.299	4.116.668
3	Jatilawang	2.982.303	3.366.858
4	Rawalo	2.664.942	3.004.739
5	Kebasen	1.936.324	2.198.214
6	Kemranjen	1.980.165	2.231.636
7	Sumpiuh	2.706.670	3.089.122
8	Tambak	2.424.283	2.776.984
9	Somagede	3.423.216	3.853.366
10	Kalibagor	3.177.554	3.559.329
11	Banyumas	3.900.506	4.419.095
12	Patikraja	2.328.248	2.597.512
13	Purwojati	3.543.600	4.010.771
14	Ajibarang	3.255.499	3.676.362
15	Gumelar	1.812.907	2.026.895
16	Pekuncen	1.963.921	2.219.661
17	Cilongok	2.839.578	3.178.698
18	Karanglewas	2.280.244	2.539.271
19	Kedungbanteng	2.315.169	2.572.169
20	Baturraden	2.880.037	3.209.239
21	Sumbang	1.923.310	2.131.504
22	Kembaran	2.408.850	2.647.538
23	Sokaraja	3.279.040	3.654.038
24	Purwokerto Selatan	4.129.395	4.625.902
25	Purwokerto Barat	6.537.187	7.480.394
26	Purwokerto Timur	13.066.709	14.940.587
27	Purwokerto Utara	2.776.884	3.245.337

Sumber : RPJMD Kabupaten Banyumas,2016

Dari tabel di atas kita bisa melihat bahwa pertumbuhan PDRB Per Kapita paling tinggi dimiliki oleh Kecamatan Purwokerto Timur sedangkan PDRB Per Kapita paling rendah dimiliki oleh Kecamatan Patikraja. Pertumbuhan ekonomi yang tidak sama yang kita lihat dari PDRB Per Kapita menimbulkan masalah yaitu

ketimpangan pendapatan. Kondisi sumber daya alam, infrastruktur jalan, alokasi investasi tidak menjadi faktor yang diprediksi bisa mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena beberapa hal. Sumber daya alam tidak menjadi faktor penyebab dikarenakan kondisi sumber daya alam di Kabupaten Banyumas rata-rata sama sehingga, tidak menimbulkan perbedaan.

Infrastruktur jalan tidak menjadi faktor penyebab karena kondisi jalan sudah bagus di seluruh daerah di Kabupaten Banyumas sehingga, tidak menimbulkan perbedaan. Dan alokasi investasi tidak menjadi penyebab karena, untuk alokasi investasi di bidang jasa untuk Kabupaten Banyumas sudah lumayan bagus hal tersebut terlihat dengan berdirinya hotel di berbagai wilayah di daerah Kabupaten Banyumas namun, tidak menimbulkan perbedaan.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti "Pengaruh Aglomerasi, Migrasi Penduduk, Ketimpangan Pendidikan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Banyumas".

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka, permasalahan yang terjadi di kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Terjadi ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.
2. Terjadi pengelompokan sektor industri pada satu wilayah saja atau disebut aglomerasi dimana mengakibatkan ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.

3. Terjadi migrasi penduduk yang tidak lancar dimana migrasi penduduk menyebabkan ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.
4. Terjadinya ketidakmerataan pendidikan yang mengakibatkan ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.
5. Perbedaan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.

1.3. Cakupan Masalah

Penelitian ini akan meneliti tentang masalah ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas dimana diprediksi penyebab dari ketimpangan tersebut adalah aglomerasi, migrasi, ketimpangan pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Keempat variabel ini diyakini dapat mengakibatkan kondisi pendapatan yang berbeda yang menyebabkan ketimpangan pendapatan. Selain itu penelitian ini meneliti tentang keempat variabel bebas ada variabel yang memiliki pengaruh yang kecil dan pengaruh yang besar terhadap ketimpangan pendapatan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana pengaruh migrasi penduduk terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas?

3. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas?
5. Bagaimana pengaruh aglomerasi, migrasi penduduk, ketimpangan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas?
6. Apa yang menyebabkan salah satu variabel memiliki pengaruh paling kecil terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas?
7. Apa yang menyebabkan salah satu variabel memiliki pengaruh paling besar terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.
2. Menganalisis pengaruh migrasi penduduk terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.
3. Menganalisis pengaruh ketimpangan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.
4. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.

5. Menganalisis pengaruh aglomerasi, migrasi penduduk, ketimpangan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.
6. Menganalisis penyebab salah satu variabel memiliki pengaruh paling kecil terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.
7. Menganalisis penyebab salah satu variabel memiliki pengaruh paling besar terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.

1.6. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam melakukan penelitian berikutnya tentang ketimpangan pendapatan regional serta mampu memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang ketimpangan pendapatan regional.

1.6.2 Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Banyumas agar lebih mengoptimalkan usaha-usaha untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.

1.7 Orisinalitas

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu berjudul : “Analisis Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Investasi dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-

2012” yang diteliti oleh Muhammad Haris Hidayat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel yang terdiri dari silang waktu periode 2005-2012 dan silang tempat 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode pendekatan FEM (Fixed Effect Model).

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah, sedangkan investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah. Dengan nilai *R square* sebesar 0,9920 berarti variasi pertumbuhan ekonomi, Investasi dan IPM mampu menerangkan 99,20 persen variasi ketimpangan pendapatan antar daerah dan 0,80 persen ketimpangan pendapatan antar daerah dijelaskan oleh variasi yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Rujukan yang selanjutnya adalah penelitian dengan judul” Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten /Kota di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2012” yang dilakukan oleh Fafan Triastanto. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode explanatory. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk data panel . Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan sebagai variabel terikat sedangkan pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional dan jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sebagai variabel bebas.

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda (multipler linear regression method) dengan model panel data dan sebagai alat pengolahan data menggunakan program Eviews 6. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama (serentak) pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, dan jumlah penduduk antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2001-2012 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,00000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,1. Secara individu (parsial) menunjukkan bahwa semua variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sementara variabel yang berpengaruh dominan terhadap variabel dependen. Sementara variabel yang berpengaruh dominan terhadap kesejahteraan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada taraf signifikansi 0,1 adalah pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang akan dilakukan dengan judul “Pengaruh Aglomerasi, Migrasi Penduduk, Ketimpangan Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Banyumas”. Analisis yang akan digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi berganda. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang menjadi rujukan adalah penggunaan variabel bebas, metode penelitian yang digunakan serta jenis data yang digunakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Ketimpangan (*Grand Theory*)

Ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada masalah ekonomi dan melupakan aspek sosial.

Sjafrizal(2008:104) menyatakan bahwa:”Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah”.

Dari uraian di atas ketimpangan pembangunan yang terjadi antar daerah dengan pusat merupakan hal yang wajar, karena adanya perbedaan sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah. Ketimpangan pembangunan mula-mula dimunculkan oleh Douglas C.North. Douglas C. North menganalisa tentang sebuah teori dimana teori tersebut bernama teori Hipotesa Neo Klasik.

Sjafrizal(2008:105) mengatakan bahwa :”Pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan cenderung lebih meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak”.

Berdasarkan hipotesa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan akan meningkat pada negara berkembang sedangkan untuk negara maju akan cenderung menurun. Sehingga, kurva ketimpangan pembangunan akan berbentuk huruf U terbalik (*Reverse U-shape Curve*).

Ketimpangan pembangunan disebabkan oleh beberapa faktor. Banyak pandangan mengenai faktor-faktor penyebab ketimpangan antar wilayah yang dikemukakan oleh beberapa hasil studi oleh beberapa ahli di antaranya:

1. Esmara (1975),
2. Soediono dan Igusa (1992),

3. Azis (1989),
4. Hill dan Williams (1989),
5. Ibrahim (1974),
6. Uppal dan Handoko (1988),
7. Sjafrizal (1997&2000),

Dari pandangan ahli-ahli di atas terdapat faktor-faktor utama penyebab ketimpangan antar wilayah adalah sebagai berikut (Tambunan ,2001) :

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah adalah kegiatan ekonomi wilayah hanya terpusat pada daerah tertentu saja. Yang termasuk dalam konsentrasi kegiatan ekonomi adalah aglomerasi industri.
2. Alokasi investasi adalah distribusi investasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Alokasi investasi adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menurut teori pertumbuhan ekonomi Harrod- Domar.
3. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah. Mobilitas faktor produksi adalah pergerakan faktor produksi baik berupa tenaga kerja maupun bahan baku. Sesuai dengan teori A.Lewis, yang dikenal dengan *unlimited supply of labour*, jika perpindahan faktor produksi antar daerah tidak ada hambatan, maka pada akhirnya pembangunan ekonomi yang optimal antar daerah akan tercapai dan semua daerah akan lebih baik.
4. Perbedaan sumber daya alam. Dasar pemikiran klasik sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya SDA akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin SDA.

5. Perbedaan kondisi demografis. Kondisi demografis meliputi jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, dan etos kerja.
6. Kurang lancarnya perdagangan. Kurang lancarnya arus barang dan jasa mempengaruhi pembangunan suatu daerah. Dari sisi permintaan, kelangkaan akan barang dan jasa untuk konsumen mempengaruhi permintaan pasar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi lokal. Dari sisi penawaran, sulitnya mendapatkan barang modal, input perantara, bahan baku atau material lainnya dapat menyebabkan kegiatan ekonomi di suatu daerah lumpuh atau tidak beroperasi.

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Teori Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang terjadi jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, ketimpangan pendapatan yang terjadi menunjukkan bahwa pendapatan rendah dinikmati sebagian besar penduduk dan pendapatan yang besar hanya dinikmati oleh sebagian penduduk. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai hak milik (*property rights*) masyarakatnya (Glaeser,2006).

Ketimpangan pendapatan tidak dapat dihilangkan dari proses pembangunan suatu daerah. Dengan adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya agar tidak tertinggal jauh dari daerah di sekitarnya yang sudah baik kualitas hidupnya.

Perhatian ketimpangan pendapatan tidak hanya pada masyarakat yang berada di garis kemiskinan namun juga harus memperhatikan masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan. Hal itu dikarenakan karena beberapa alasan sebagai berikut (Todaro,2004) :

1. Ketimpangan pendapatan yang ekstrem menyebabkan inefisiensi ekonomi. Ketimpangan pendapatan menyebabkan alokasi aset yang tidak efisien.
2. Ketimpangan pendapatan menyebabkan kelemahan stabilitas sosial dan solidaritas.
3. Ketimpangan pendapatan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil.

Ketimpangan pendapatan bisa dianalisis menggunakan alat ukur berupa koefisien gini(*gini coefficient*) yang merupakan sebagai ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketidakmerataan sempurna) (Todaro,2004). Selain menggunakan koefisien gini ketimpangan juga bisa dianalisis menggunakan Indeks Wiliamson dan Indeks Entrhopy Theil dimana ukuran angkanya sama dengan koefisien gini dimana jika nol maka menggambarkan pemerataan sempurna sedangkan satu menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

2.2.1.1 Ukuran Ketimpangan

2.2.1.1.1 Indeks Gini

Indeks gini adalah murni ukuran statistik untuk variabilitas dan ukuran normatif untuk mengukur ketimpangan (Wodon, 2002). Pendekatan dari indeks gini adalah sangat langsung terhadap ukuran ketidakmerataan, memuat perbedaan diantara setiap pendapatan, dimana sejauh ini merupakan ukuran ketidakmerataan

yang sangat populer. Indeks gini digunakan untuk menghasilkan sebuah kurva yaitu kurva Lorenz. Dimana hal ini dilakukan dengan menggabungkan pendapatan masyarakat dengan penerimaan pendapatan masyarakat dalam sebuah daerah.

Nilai dari indeks gini berkisar antara nol sampai satu. Nilai nol menggambarkan bahwa seluruh pendapatan terbagi secara merata untuk semua masyarakat, sedangkan nilai satu menggambarkan seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu orang atau satu daerah saja.

2.2.1.1.2 Kurva Lorenz

Todara (2004:225) menyatakan bahwa: "Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara presentase pendapatan dengan presentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selama satu tahun misalnya".

Kurva Lorenz dibentuk oleh dua sumbu yaitu sumbu vertikal dan horizontal.

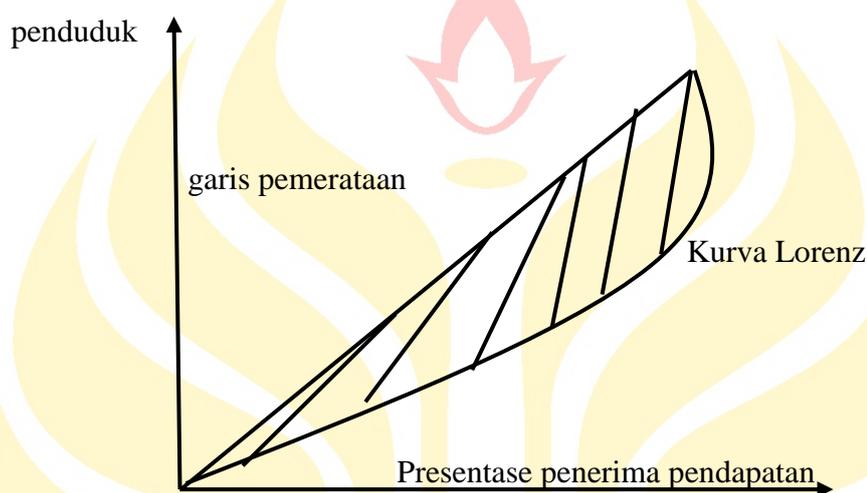
Dimana sumbu vertikal adalah presentase pendapatan dan sumbu horizontal adalah presentase populasi. Dalam kurva Lorenz terdapat sebuah garis diagonal yang disebut dengan garis pemerataan.

"Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan sempurna), maka semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya. Kasus ekstrem dari ketidakmerataan sempurna yaitu, apabila hanya seorang saja yang menerima seluruh pendapatan nasional, sementara orang-orang lainnya sama sekali tidak menerima pendapatan) akan diperlihatkan oleh kurva Lorenz yang berhimpit dengan sumbu horizontal sebelah bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan" (Todaro, 2004:225).

Gambar di bawah ini kita bisa melihat gambar kurva Lorenz dimana kurva tersebut menggambarkan distribusi pendapatan tidak merata karena kurva menjauhi garis pemerataan pendapatan dan hampir berhimpit dengan sumbu horizontal. Semakin menjauh dari garis pemerataan maka semakin tidak merata

distribusi pendapatannya dan semakin mendekati garis pemerataan maka semakin merata distribusi pendapatannya.

Untuk gambar dari kurva Lorenz bisa kita lihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. 1. Kurva Lorenz

2.2.1.1.3. Indeks Wiliamson

Indeks ini ditemukan oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1966 dimana mula-mula teknik ini untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Walaupun indeks ini memiliki kelemahan namun, indeks ini cukup lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan antar wilayah (Sjafrizal,2008).

“Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto sebagai data dasar. Alasannya karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah bukan tingkat kemakmuran antar kelompok”(Sjafrizal,2008: 108).

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan antar wilayah, dimana formula dari indeks Williamson adalah sebagai berikut:

$$IW = \sqrt{\frac{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}{Y}}$$

Dimana :

Y_i = PDRB per kapita daerah i

Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

f_i = Jumlah penduduk daerah i

N = Jumlah penduduk seluruh daerah

Nilai dari indeks Williamson antara nol sampai dengan satu, sedangkan semakin mendekati nol maka menggambarkan wilayah tersebut semakin tidak timpang, sedangkan semakin mendekati satu maka menggambarkan wilayah tersebut semakin timpang atau tidak merata pendapatannya.

2.2.1.1.4 Indeks Entropy Theil

Indeks Entropy Theil merupakan salah satu ukuran dari ketimpangan. Indeks ini dibagi menjadi 2 subindikasi yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antar wilayah (Kuncoro, 2004).

Indeks ini sebagai ukuran ketimpangan memiliki kelebihan tertentu. Pertama, indeks ini dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antar daerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisa menjadi lebih luas. Kedua, dengan menggunakan indeks ini dapat pula dihitung kontribusi setiap daerah terhadap ketimpangan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan yang cukup penting (Sjafrizal, 2008). Indeks ini menggunakan produk regional domestik bruto per kapita sebagai data dasar. Formulasi indeks ini dapat kita lihat pada formula di bawah ini:

$$T = \sum_i \sum_j (Y_{ij} / Y) \ln(\bar{Y} / Y_i)$$

Dekomposisi indeks Entropi Theil :

$$T = \sum_i (Y_i / Y) T_i + \sum_i (Y_i / Y) \ln(\bar{Y} / Y_i)$$

Total Theil = *Theil Within* + *Theil between*

$$T_i = \sum_j (Y_{ij} / Y_i) \ln(\bar{Y} / Y_i)$$

Dimana :

Y_{ij} = Total pendapatan di kabupaten i, grup j

Y = Total pendapatan untuk propinsi ($\sum Y_{ij}$)

\bar{Y}_{ij} = Rata-rata pendapatan di propinsi i, grup j

\bar{Y} = Pendapatan perkapita untuk Propinsi Jawa Tengah

Formulasi indeks Entropy Theil bisa kita lihat pada formula di atas. Penafsiran indeks ini sama dengan indeks Williamson dan ukuran ketimpangan lainnya yaitu, semakin mendekati nol maka semakin tidak timpang namun, sebaliknya semakin mendekati satu maka semakin timpang keadaannya.

2.2.1.1.5 Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan bentuk ukuran ketimpangan. Tipologi ini digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua pendekatan (Sjafrizal,2008).

Menurut tipologi ini perkembangan pembangunan antar daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*High Growth and High Income*)
2. Daerah maju tetapi tertekan (*High Income but Low Growth*)
3. Daerah berkembang cepat (*High Growth but Low Income*)
4. Daerah relatif tertinggal (*Low Growth and Low Income*)

Tabel 2.1 Tipologi Klassen

Y	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
$r_i > r$	Pendapatan dan pertumbuhan tinggi = daerah maju	Pendapatan rendah, pertumbuhan tinggi = daerah berkembang cepat
$r_i < r$	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah = daerah maju tetapi tertekan	Pendapatan rendah, pertumbuhan rendah = daerah tertinggal

Keterangan:

Y = Pendapatan per kapita provinsi

Y_i = Pendapata per kapita daerah kabupaten/kota

r = Pertumbuhan ekonomi provinsi

r_i = Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota

2.2.1.2 Tren Distribusi Pendapatan

Tren distribusi pendapatan merupakan macam-macam distribusi pendapatan yang terjadi di daerah yang mana dalam distribusi pendapatan selalu terjadi sebuah ketimpangan distribusi pendapatan.

Tren distribusi pendapatan yang terjadi di daerah adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan Kota dan Desa

“Berbagai studi empiris menunjukkan modernisasi pertanian telah memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan. Studi Gibbons, et al (1980) menyimpulkan bahwa revolusi hijau telah memperparah kepincangan distribusi pendapatan masyarakat karena meskipun petani kecil secara umum membaik kondisinya sebagai hasil modernisasi pertanian, namun posisi mereka secara relatif lebih buruk dibanding petani kaya yang jauh meningkat penghasilannya. Hasil penelitian Arif dan Wong (1997) membuktikan bahwa di daerah pedesaan Jawa terjadi proses meningkatnya

kepincangan pendapatan, seperti ditunjukkan oleh meningkatnya angka gini dari 0,3048 pada tahun 1970 menjadi 0,3604 pada tahun 1976” (Mudrajad Kuncoro, 2006: 144).

Dari uraian di atas kita bisa melihat bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di karenakan revolusi hijau yang terjadi dimana revolusi ini adalah proses modernisasi pertanian. Revolusi hijau menggeser petani desa yang memiliki peralatan yang sederhana dengan digantikan oleh petani kota yang memiliki peralatan yang lebih modern. Kondisi tersebut mengakibatkan perbedaan pendapatan antara petani desa dan kota dimana pendapatan petani desa lebih buruk dari petani kota.

2. Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional adalah ketimpangan yang terjadi antar daerah. Ketimpangan ini telah lama menjadi bahan kajian para pakar ekonomi regional. pakar ekonomi regional yang meneliti ketimpangan regional adalah Esmara (1975).

“Esmara (1975) merupakan peneliti pertama yang mengukur kesenjangan ekonomi antardaerah. Berdasarkan data dari tahun 1950 hingga 1960, ia menyimpulkan Indonesia merupakan negara dengan kategori kesenjangan daerah yang rendah apabila sektor migas diabaikan” (Kuncoro,2006: 144)

Penelitian selanjutnya adalah Ardani (1996) penelitian tersebut menganalisis kesenjangan pendapatan dan konsumsi antar daerah dengan menggunakan indeks Williamson selama 1968-1993 dan 1983-1993. Kesimpulannya adalah pada tahap awal pembangunan ekonomi terdapat kesenjangan kemakmuran antar daerah, namun semakin maju pembangunan ekonomi kesenjangan tersebut semakin menyempit (Kuncoro,2006).

Dari dua penelitian tersebut kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa ketimpangan yang terjadi antar daerah karena proses pembangunan di setiap

daerah berbeda-beda dimana setiap awal pembangunan ekonomi selalu terjadi ketimpangan distribusi pendapatan namun akan menyempit sendiri seiring dengan proses pembangunan ekonomi yang lebih baik.

3. Ketimpangan Interpersonal

Ketimpangan interpersonal adalah ketimpangan yang terjadi pada masing-masing golongan masyarakat di suatu daerah. Dimana ketimpangan ini terjadi akibat adanya perubahan distribusi pendapatan pada golongan berpenghasilan tinggi, yang dapat diartikan bahwa golongan kaya semakin kaya.

“Hughes dan Islam (1981) menunjukkan bahwa ada peningkatan yang lebih besar dalam kesenjangan di Jawa dibanding daerah manapun antara tahun 1970 sampai 1976. Peningkatan kesenjangan ini terutama akibat adanya perubahan distribusi pendapatan pada golongan berpenghasilan tinggi, yang dapat ditafsirkan bahwa yang kaya semakin kaya. Di daerah pedesaan Jawa ternyata terjadi penurunan ketimpangan, yang mengindikasikan adanya perubahan dalam golongan pendapatan yang paling rendah” (Kuncoro, 2006: 148).

Dari uraian di atas kita bisa menyimpulkan bahwa ketimpangan interpersonal adalah ketimpangan yang terjadi karena perubahan distribusi pendapatan pada golongan-golongan masyarakat di suatu daerah.

4. Ketimpangan antar Kelompok Sosial Ekonomi

Ketimpangan antar kelompok sosial ekonomi adalah ketimpangan yang terjadi antar golongan pekerjaan. Di Indonesia pendidikan merupakan ukuran yang penting dalam menentukan pendapatan. Ini diakibatkan karena akses terhadap pekerjaan dengan gaji tinggi baik di sektor pemerintah maupun swasta tergantung dari tingginya tingkat pendidikan (Kuncoro,2006).

2.2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan

Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah adalah sebagai berikut (Tambunan, 2001) :

1. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat sehingga terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, jika konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah maka akan mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sekitar.

Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak di daerah tertentu, misalnya : minyak bumi, gas, batu bara dan bahan mineral lainnya. Disamping itu terdapatnya lahan yang subur juga turut mempengaruhi, khususnya menyangkut dengan pertumbuhan pertanian. Kedua, meratanya fasilitas transportasi baik darat, laut dan udara juga turut mempengaruhi konsentrasi kegiatan antar daerah. Ketiga, kondisi demografis atau kependudukan juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi pada sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

2. Alokasi Investasi

Investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke daerah ternyata lebih rendah maka, proses pembangunan ekonomi akan menjadi terhambat.

Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Sedangkan alokasi investasi oleh swasta di pengaruhi oleh kekuatan pasar.

3. Tingkat Mobilitas Faktor Produksi Yang Rendah Antar Daerah

Mobilitas barang dan jasa yang kurang lancar dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan bisa terjadi karena beberapa alasan diantaranya adalah mobilitas yang kurang lancar dapat menyebabkan kelebihan produksi suatu daerah sehingga tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Mobilitas jasa di antaranya adalah migrasi dan transmigrasi. Ketidاكلancaran mobilitas jasa akan menimbulkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak bisa dimanfaatkan oleh daerah lain sehingga, proses pembangunan menjadi terbelakang.

4. Perbedaan Sumber Daya Alam

Penyebab pertama yang mendorong ketimpangan antar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah. Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan kandungan sumber daya alam di Indonesia ternyata cukup besar. Ada daerah yang memiliki kandungan minyak dan gas, tetapi ada juga daerah yang tidak memiliki. Ada daerah yang memiliki deposit batu bara yang cukup besar, tapi daerah lain tidak. Demikian juga dengan tingkat kesuburan lahan yang sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah.

Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah.

Dengan kondisi tersebut maka akan mendorong perbedaan pembangunan ekonomi di setiap daerah yang nantinya akan menimbulkan ketimpangan antar wilayah. Daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang banyak akan cenderung lebih baik pembangunan ekonominya sedangkan daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang sedikit akan cenderung lebih lambat pembangunannya.

5. Perbedaan Kondisi Demografis

Kondisi demografis setiap daerah berbeda-beda sehingga menimbulkan ketimpangan antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksudkan di sini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Kondisi demografis menyebabkan ketimpangan antar wilayah karena hal ini berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Kondisi demografis yang kurang baik akan menyebabkan rendahnya produktivitas kerja masyarakat yang akan berdampak pada pembangunan ekonominya, begitupula sebaliknya jika produktivitas kerja masyarakat tinggi maka akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang tinggi pula. Hal ini terjadi karena, dengan produktivitas kerja yang tinggi akan mendorong investor untuk melakukan investasi di daerah tersebut.

6. Kurang Lancarnya Perdagangan

“Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga merupakan unsur yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional di Indonesia. Tidak lancarnya perdagangan antar daerah disebabkan terutama oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Perdagangan antar wilayah meliputi barang jadi, barang modal, input perantara, bahan baku, material-material lainnya untuk produksi barang dan jasa. Jadi, tidak lancarnya arus barang dan jasa antar daerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran” (Tambunan, 2001).

Menurut Lincoln (dalam Krinantya, 2014) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di negara-negara yang sedang berkembang, yaitu :

1. Pertambahan penduduk yang tinggi sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita,
2. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang,
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah,
4. Investasi yang banyak dilakukan pada proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga menambah jumlah pengangguran,
5. Rendahnya mobilitas sosial,
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha golongan kapitalis,
7. Kondisi memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara yang sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap ekspor negara yang sedang berkembang,
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain sebagainya.

2.2.1.4 Dampak Ketimpangan

Ketimpangan telah memberikan berbagai dampak terhadap daerah dan masyarakat. Adapun yang menjadi dampak dari ketimpangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Banyak wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan. Masyarakat yang berada di wilayah tertinggal pada umumnya masih belum banyak tersentuh oleh program-program pembangunan sehingga, masyarakat tersebut terisolir dari wilayah sekitarnya.
2. Belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh. Masih banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasinya strategis namun belum dikembangkan secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal, antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan
 - b. Belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah
 - c. Belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku swasta
 - d. Belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah
 - e. Masih lemahnya koordinasi, sinergi dan kerja sama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah dan masyarakat serta antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan
 - f. Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan

pemasaran dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerja sama investasi

- g. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah
- h. Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerja sama antar wilayah maupun antar negara untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.

2.2.1.5 Penanggulangan Ketimpangan

Kebijakan dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi ketimpangan dilakukan sesuai dengan faktor yang menentukan terjadinya ketimpangan pendapatan. Kebijakan yang dimaksudkan di sini adalah upaya pemerintah pusat maupun daerah.

Penanggulangan ketimpangan bisa dilakukan dengan beberapa kebijakan diantaranya sebagai berikut (Sjafrizal,2008) :

1. Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan

Upaya untuk mendorong kelancaran mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah dapat dilakukan melalui penyebaran pembangunan sarana dan prasarana perhubungan keseluruh pelosok wilayah. Prasarana perhubungan yang dimaksud adalah fasilitas jalan , terminal dan pelabuhan laut yang mendorong proses perdagangan antardaerah. Selain itu, pemerintah juga perlu menambah jaringan komunikasi dan fasilitas telekomunikasi agar tidak ada daerah yang terisolir.

“Bila hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah , maka ketimpangan akan dapat dikurangi. Karena usaha perdagangan dan mobilitas faktor produksi, khususnya investasi akan dapat lebih diperlancar” (Sjafrizal,2008: 122).

2. Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan

“Melalui proses transmigrasi dan migrasi spontan ini, kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh daerah terbelakang akan dapat pula diatasi sehingga proses pembangunan daerah bersangkutan akan dapat pula digerakkan”(Sjafrizal,2008:123).

Dari uraian di atas kita bisa tahu bahwa dengan adanya transmigrasi dan migrasi spontan akan membantu mengurangi ketimpangan yang terjadi. Hal itu dikarenakan migrasi dan transmigrasi akan membantu mendorong pembangunan ekonomi untuk setiap daerah sehingga, tidak ada perbedaan kondisi pembangunan ekonomi untuk setiap daerah.

3. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

“Penerapan konsep pusat pertumbuhan ini untuk mendorong proses pembanguana daerah sekaligus untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan pada kota-kota skala kecil dan menengah. Dengan demikian, kota-kota skala kecil dan menengah akan berkembang sehingga kegiatan pembangunan dapat lebih disebarakan ke pelosok daerah” (Sjafrizal,2008:124).

Kebijakan ini diperkirakan akan dapat mengurangi ketimpangan karena menerapkan konsep konsentrasi dan desentralisasi.

4. Pelaksanaan Otonomi Daerah

“Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan juga dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan antarwilayah. Hal ini jelas, karena dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan daerah termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan dapat lebih digerakkan” (Sjafrizal,2008: 124).

Dari uraian di atas kita bisa menyimpulkan bahwa dengan adanya otonomi daerah masyarakat memiliki hak untuk menggali potensi daerah yang dimiliki

tanpa harus merasa takut untuk mengeluarkan inisiatif dan aspirasi. Dengan hal tersebut maka, pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan antar wilayah akan dapat dikurangi.

2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

“Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat dilihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dalam harga konstan” (Tarigan,2005: 46).

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan PDRB (produk domestik regional bruto) dan PDRB Per kapita. Produk domestik regional bruto adalah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh satu perekonomian dalam jangka satu tahun dan dinyatakan dalam harga dasar. Perhitungan PDRB (produk domestik regional bruto) menggunakan tiga metode yaitu: metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Perhitungan dengan tiga metode tersebut menghasilkan hasil yang sama.

Produk domestik regional per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk dalam skala daerah. Produk domestik regional bruto per kapita adalah total pendapatan suatu daerah yang dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka yang digunakan semestinya adalah total pendapatan regional dibagi jumlah penduduk regional dibagi jumlah penduduk (Tarigan,2005).

2.2.2.1 Teori Pertumbuhan Klasik

“Orang yang pertama membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis adalah Adam Smith yang membahas ekonomi dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (1776). Inti ajaran Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi *full employment*, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner” (Tarigan,2005: 47). Dalam ekonomi klasik pemerintah tidak boleh ikut campur dalam urusan

perekonomian dimana tugas pemerintah hanya menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian. Jadi, yang berperan disini adalah masyarakat bukan pemerintah.

Pemerintah tidak terjun langsung dalam kegiatan produksi dan jasa.

2.2.2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo- Klasik

“Teori ini adalah merupakan sanggahan dari teori dependensia. Dimana teori ini adalah anti dengan pendekatan revolusioner atau teori penawaran. Teori ini merekomendasikan swastanisasi BUMN, meningkatkan peran perencanaan dan penetapan regulasi ekonomi yang menciptakan iklim kondusif bagi peningkatan peran pihak swasta dalam pembangunan” (Kuncoro,2006: 70).

Menurut ekonom yang menganut teori ini, semakin besar campur tangan pemerintah dalam perekonomian, semakin lambat laju pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh negara. Dengan mendorong pembebasan pasar dari campur tangan pemerintah, swastanisasi BUMN, promosi perdagangan bebas dan ekspansi ekspor, membuka diri terhadap penanaman modal asing, dan meniadakan ketidakefisien dalam regulasi pemerintah. Efisiensi dan pertumbuhan ekonomi diyakini akan terdorong maju.

“Teori ini hanya tepat diterapkan di negara-negara yang maju daripada negara-negara berkembang. Konsep perdagangan bebas, *laissez faire*, dan pasar persaingan sempurna merupakan hal yang hanya dapat dipenuhi oleh negara-negara maju. Bagi negara berkembang pasar yang ada lebih

berbentuk monopoli atau oligopoli. Perbedaan struktur masyarakat dan kelembagaan yang dimiliki oleh negara sedang maju dengan negara sedang berkembang, menjadikan teori pembangunan tersebut pada banyak kasus justru gagal dilaksanakan di negara sedang berkembang” (Kuncoro, 2006: 72).

2.2.2.3 Teori Geografi Ekonomi Baru

Teori geografi ekonomi baru muncul akibat kegagalan teori neoklasik dalam menangkap dinamika perubahan geografis pada tingkat global. Argumen teori ini menekankan pada hasil yang meningkat, skala ekonomis, dan persaingan yang tidak sempurna. Para penganut teori ini percaya bahwa ketiga hal tersebut jauh lebih penting daripada hasil skala yang konstan, persaingan sempurna, dan keunggulan komparatif dalam menjelaskan perdagangan dan ketimpangan distribusi kegiatan ekonomi. Ekonomi geografi berkembang karena Paul Krugman. Ekonomi ala Krugman merupakan kombinasi model persaingan tidak sempurna dan skala ekonomis yang digunakan dalam skala regional dengan perdagangan. Kejutan pada suatu daerah dapat menimbulkan konsekuensi pertumbuhan jangka panjang (Kuncoro, 2006).

2.2.2.4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Harrod Domar

Teori ini dikembangkan oleh Roy F. Harrod di Inggris dan Evsey D. Domar di Amerika Serikat. Teori ini melengkapi teori yang telah dikemukakan terlebih dahulu oleh Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis) sedangkan Harrod- Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi :

1. Perekonomian bersifat tertutup,
2. Hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan,
3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (constant return scale), serta tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk (Tarigan, 2005 : 49).

Teori tersebut menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut:

$$g = k = n$$

Keterangan :

$g = growth$ (tingkat pertumbuhan output)

$k = capital$ (tingkat pertumbuhan modal)

$n =$ tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Agar terdapat keseimbangan maka antara tabungan (S) dan investasi (I) harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan, padahal peran k untuk menghasilkan tambahan produksi ditentukan oleh v (capital output ratio = rasio modal output). Apabila tabungan dan investasi adalah sama ($I = S$), maka:

$$I/K = S/K = S/K = Y/K = (S/Y) / (K/Y) = S/V$$

Agar pertumbuhan tersebut mantap, harus dipenuhi syarat yaitu $g = n = s/v$. Karena s, v, dan n bersifat independen maka dalam perekonomian tertutup sulit tercapai kondisi pertumbuhan yang mantap. Harrod- Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi, kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan sisi permintaan barang (Tarigan, 2005).

2.2.3 Aglomerasi

Aglomerasi yaitu konsentrasi spasial dari aktifitas ekonomi di suatu kawasan karena penghematan yang diakibatkan adanya lokasi saling berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan kluster spasial untuk menekan biaya-biaya, seperti biaya transportasi, informasi, dan komunikasi.

Kekuatan aglomerasi dan deaglomerasi dapat menjelaskan terjadinya konsentrasi dan dekonsentrasi industri. Ada tiga manfaat yang ditimbulkan oleh kegiatan di atas, yaitu : penghematan skala (*scale economies*), penghematan lokasi (*localization economies*), dan penghematan urbanisasi (*urbanisation economies*). Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang tinggi akan dapat mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah karena proses pembangunan daerah yang cepat hanya akan terjadi pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi. Sedangkan konsentrasi ekonomi yang rendah akan menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu ketidakmerataan akan menimbulkan ketimpangan dalam proses pembangunan antar wilayah (Sjafrizal,2008).

Istilah aglomerasi pertama kali diperkenalkan oleh Weber dan disempurnakan oleh Alfred Marshall (Tarigan :2005) mengenai penghematan aglomerasi (*agglomeration economies*) atau disebut juga sebagai industri yang terlokalisir (*localized industries*). Menurut Marshall, sebuah industri akan memilih lokasi yang memungkinkan untuk berlangsungnya kegiatan ekonomi dalam jangka panjang sehingga keuntungan akan meningkat apabila mendirikan usaha di sekitar lokasi tersebut.

Menurut McCann(2001) bahwa terdapat tiga sumber mengapa skala pengembalian meningkat selalu tercapai, yaitu:

1. Kelimpahan Informasi (*Information Spillovers*). Jika banyak perusahaan pada industri yang tergolong sejenis, maka dengan beraglomerasi pada lokasi yang sama maka tenaga kerja pada perusahaan tertentu akan secara relatif mudah

berhubungan dengan tenaga kerja dari perusahaan lokal lain. Dengan demikian, pertukaran informasi baik antar tenaga kerja maupun antar perusahaan akan lebih mudah dan berlangsung setiap saat.

2. Input Lokal yang Tidak Diperdagangkan (*Non-traded local inputs*). Keadaan dimana perusahaan-perusahaan dalam industri yang sejenis mengelompok di suatu tempat maka ada beberapa input produksi tertentu yang menjadi lebih efisien jika digunakan secara bersama-sama oleh pekerja di perusahaan-perusahaan tersebut dibandingkan jika input tersebut dibeli secara individu oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
3. Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil Lokal (*Local skilled-labour pool*) Ketersediaan tenaga kerja terampil di wilayah tersebut akan menyebabkan turunnya biaya tenaga kerja bagi perusahaan-perusahaan di lokasi tersebut.

Aglomerasi memiliki keuntungan yang tidak akan diperoleh oleh suatu industri jika letak industri menyebar.

Keuntungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penghematan Skala (*scala economies*), yaitu adanya penghematan dalam produksi secara internal bila skala produksinya ditingkatkan. Sehingga dapat memberikan manfaat pada konsentrasi penduduk dalam jumlah besar daripada jumlah penduduk yang lebih sedikit, industri dan kegiatan lainnya.
2. Penghematan lokasi (*lokalisasi economies*), yaitu kekuatan yang diasosiasikan dengan penghematan yang dinikmati oleh semua perusahaan dalam suatu industri yang sejenis pada suatu lokasi tertentu.
3. Penghematan urbanisasi (*urbanization economies*), yaitu jenis penghematan yang diasosiasikan dengan penambahan jumlah total (penduduk, hasil industri, pendapatan dan kemakmuran) di suatu lokasi untuk semua kegiatan yang dilakukan bersama-sama (Sjafrizal,2008 :135).

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa setiap pengelompokan industri memiliki keuntungan baik untuk industri atau penduduk yang disekitar

industri. Aglomerasi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan konsep dan paradigma. Perkembangan aglomerasi dapat digolongkan dalam perspektif klasik dan modern.

2.2.3.1 Aglomerasi Klasik

Dalam menjelaskan fenomena aglomerasi, banyak ekonom mendefinisikan kota sebagai hasil dari proses produksi aglomerasi secara spasial. Teori klasik mengenai aglomerasi beragumen bahwa aglomerasi muncul karena para pelaku ekonomi berupaya mendapatkan penghematan aglomerasi (*agglomeration economies*), baik karena penghematan lokalisasi maupun penghematan urbanisasi, dengan mengambil lokasi yang berdekatan satu sama lain. Aglomerasi ini mencerminkan adanya sistem interaksi antar pelaku ekonomi yang sama : apakah antar perusahaan dalam industri yang sama, antar perusahaan dalam industri yang berbeda, ataupun antar individu, perusahaan, dan rumah tangga (Kuncoro,2002).

2.2.3.2 Aglomerasi Modern

Teori- teori klasik dianggap standar ditantang untuk disempurnakan oleh tiga jalur paradigma : pertama, teori- teori baru mengenai eksternalitas dinamis, yang menekankan peranan transfer informasi dan inovasi. Kedua, paradigma pertumbuhan perkotaan. Ketiga, paradigma yang berbasis biaya transaksi.

Kelemahan mendasar penggolongan penghematan aglomerasi versi klasik adalah tidak diperhitungkannya berbagai biaya yang hendak diminimalkan oleh perusahaan. Persepsi umum saat ini berpendapat bahwa teori lokasi Neo-klasik kurang tepat sebagai dasar analisis kurang tepat sebagai dasar analisis spasial. Ini

disebabkan adanya dua fenomena yang sering dijumpai dalam praktek namun tidak mampu dijelaskan oleh paradigma yang ada (Kuncoro, 2002).

Paradigma - paradigma tersebut adalah : pertama, banyak perusahaan memiliki sedikit, atau bahkan tidak memiliki, kaitan transaksi dengan perusahaan-perusahaan lokal pada industri yang sama kendati terdapat kluster industri yang kuat di daerah tersebut. Kedua, banyak perusahaan hanya memiliki sedikit, atau bahkan tidak memiliki, kaitan transaksi sama sekali dengan perusahaan lain ataupun rumah tangga dalam suatu daerah yang sama kendati daerah tersebut memiliki berbagai kluster industri. Karena itu, validitas konsep penghematan lokalisasi dan penghematan urbanisasi menjadi dapat dipertanyakan. Apalagi pertanyaan fundamental mengapa aglomerasi terjadi di daerah- daerah tertentu masih belum terjawab tuntas (Kuncoro, 2002).

2.2.3.3 Ukuran Aglomerasi

Aglomerasi diukur menggunakan indeks Hoover Balassa dimana indeks ini digunakan untuk melihat rasio dari peranan sektor lokal tertentu terhadap sektor yang sama di tingkat ekonomi yang lebih luas.

Bentuk aljabar dari indeks tersebut adalah sebagai berikut:

$$LQ = (E_{ij} / \sum E_{ij}) / (\sum_j E_j / \sum \sum_j E_{ij})$$

Keterangan:

LQ : Koefisien Spesialisasi Regional.

E_{ij} : Tenaga Kerja sektor i di daerah j

$\sum E_{ij}$: Total tenaga kerja sektor i di daerah j

$\sum_j E_{ij}$: Tenaga kerja di daerah j

$\sum_j E_{ij}$: Total tenaga kerja di daerah j

Nilai LQ lebih dari satu (>1), menunjukkan bahwa sektor i terspesialisasi secara relatif di wilayah j dan sektor i merupakan sektor unggulan yang layak dikembangkan di wilayah j. Nilai LQ kurang dari satu (<1) menunjukkan sektor i tidak terspesialisasi secara relatif di wilayah j dan sektor i bukan merupakan sektor unggulan yang layak dikembangkan di wilayah j. Jika nilai LQ lebih dari satu, berarti sektor i memiliki daya saing dibanding sektor lain pada wilayah yang dijadikan pembandingan.

Jamie Bonet menggunakan aglomerasi produksi sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi kesenjangan wilayah pada tahun 2006. Ia menyatakan bahwa aglomerasi produksi dapat mempengaruhi kesenjangan wilayah secara langsung, yaitu pada saat terdapat hambatan bagi mobilitas tenaga kerja antar wilayah, atau saat terdapat surplus tenaga kerja dalam perekonomian.

2.2.3.4 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Aglomerasi

Aglomerasi yang terjadi pada suatu daerah atau negara bisa disebabkan karena beberapa indikator. Aglomerasi terjadi karena adanya hubungan saling membutuhkan produk diantara berbagai industri (Tarigan, 2005). Produk tersebut ialah sebagai berikut :

1. Tenaga listrik
2. Air
3. Perbengkelan
4. Jalan raya
5. Pemandokan

6. Tenaga terlatih

Ketika suatu industri memiliki produk atau keunggulan yang dapat membuat industri tersebut melakukan aglomerasi maka, industri tersebut akan memperlihatkan pada wilayah pasarnya. Semakin luas pasar industri tersebut berarti semakin besar potensi aglomerasinya, begitu juga sebaliknya.

2.2.4 Migrasi Penduduk

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ketempat yang lain baik dengan tujuan menetap atau tidak. Batas wilayah administrasi yang digunakan dalam migrasi adalah : provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau pedukuhan.

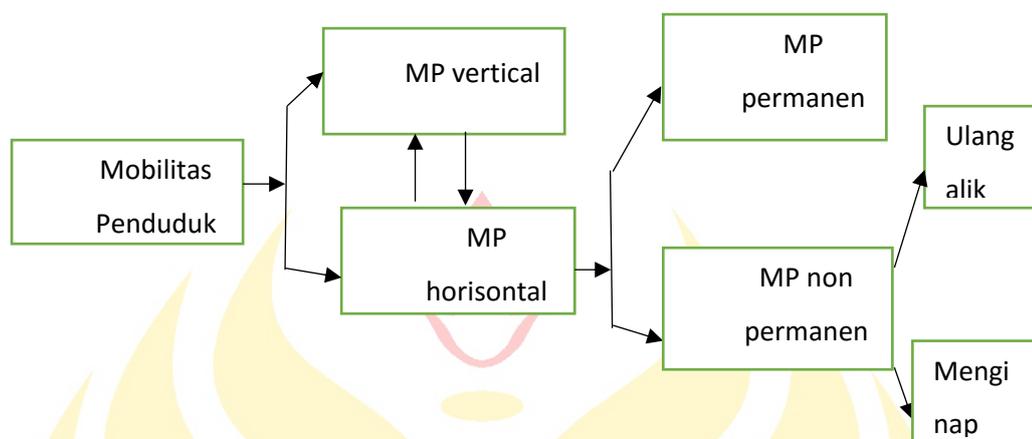
2.2.4.1 Bentuk-Bentuk Migrasi

1. Migrasi Permanen

“Migrasi permanen adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Secara operasional, migrasi dapat diukur berdasarkan konsep ruang dan waktu. Seseorang dapat disebut sebagai seorang migran, apabila orang tersebut melintasi batas wilayah administrasi dan lamanya bertempat tinggal di daerah tujuan minimal enam bulan” (Mantra: 2011:174).

2. Migrasi Sirkuler.

“Migrasi sirkuler ialah gerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tidak ada niat untuk menetap di daerah tujuan” (Mantra: 2011:174). Untuk lebih jelasnya skema migrasi bisa kita lihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.2. Skema Migrasi Penduduk

Dari skema di atas kita bisa melihat bahwa Mantra (2011) membagi jenis mobilitas menjadi 2 (dua) yakni: migrasi permanen dan migrasi non permanen. Perbedaan antara migrasi permanen dan migrasi non permanen didasarkan pada ada tidaknya niatan untuk menetap di daerah tujuan. Menurut Mantra (2011), migrasi permanen adalah gerak penduduk yang melintasi batas daerah asal ke daerah lain dengan ada niatan untuk menetap di daerah tujuan. Sebaliknya migrasi penduduk non permanen adalah gerak penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan tidak ada niatan menetap di daerah tujuan. Namun, jika hanya melihat pada niatan menetap akan muncul permasalahan pada pengukuran jenis mobilitas permanen atau non permanen. Hugo (1978) mengadopsi batasan 6 (enam) bulan seseorang menetap pada suatu wilayah secara terus menerus tanpa kembali ke daerah asal termasuk dalam mobilitas permanen (*long term migration*). Sedangkan mereka yang melakukan mobilitas yang tinggal di suatu wilayah tertentu tapi kembali (melakukan kunjungan) ke daerah asal sebelum 6 (enam) bulan masuk dalam kategori mobilitas non permanen. Mantra (2011) sendiri membagi mobilitas penduduk non permanen menjadi 2 (dua) yaitu; (1) ulang alik (*commuting*) dan (2) menginap atau mondok (*circulation*) di daerah tujuan. Perbedaan antara ulang alik (*commuting*) dan menginap atau mondok (*circulation*) adalah pada batas waktu kembali ke daerah asal. Untuk mobilitas ulang alik (*commuting*), suatu studi di Indonesia oleh Mantra mendefinisikannya dengan batasan kembali ke daerah asal pada hari itu juga atau pada batas waktu lebih dari enam jam dan kurang satu hari. Sedangkan definisi mobilitas menginap atau mondok (*circulation*) adalah dilihat dari lamanya meninggalkan daerah asal lebih dari satu hari tetapi kurang dari enam bulan. Migrasi dengan menginap atau mondok (*circulation*) ini oleh Hugo (1978) disebut sebagai migrasi sirkuler (*circular migrants*) (Mantra, 2011:173).

2.2.4.1 Faktor- Faktor Penyebab Migrasi

Pada dasarnya , faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penarik. Faktor -faktor pendorong dapat berupa hal-hal seperti berikut ini:

1. Makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan, seperti menurunnya daya dukung lingkungan dan menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh, seperti hasil tambang,kayu, atau bahan dari pertanian
2. Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal
3. Adanya tekanan-tekanan politik,agama,dan suku hingga mengganggu hak asasi penduduk di daerah asal
4. Alasan pekerjaan, atau perkawinan
5. Bencana alam seperti banjir, kebakaran,gempa bumi, musim kemarau panjang, atau adanya wabah penyakit

Faktor-faktor penarik antara lain sebagai berikut:

1. Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kehidupan
2. Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik
3. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, seperti iklim, perumahan, sekolah,dan fasilitas-fasilitas publik lainnya
4. Adanya aktivitas -aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, atau pusat kebudayaan yang merupakan daya tarik bagi orang-orang daerah lain untuk bermukim di kota besar (Moertiningsih,2010 : 137).

Faktor Pendorong Mobilitas Lee (1992) (dalam Mantra,2011) berpendapat bahwa :Faktor daerah asal adalah faktor terpenting. Di daerah asal seseorang lahir dan hidup sehingga dia tahu benar kondisi daerahnya tersebut” Hubungan migran dengan daerah asalnya dikenal sangat erat dan merupakan salah satu ciri fenomena migrasi di negara berkembang hubungan tersebut antara lain diwujudkan dengan pengiriman uang. barang bahkan ide- ide pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung. Intensitas hubungan ini antara lain ditentukan oleh jarak, fasilitas transportasi, lama merantau, status perkawinan dan jarak kekeluargaan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa kondisi daerah asal sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan mobilitas penduduk.

Dan faktor- faktor yang turut mempengaruhi dorongan dari daerah asal di antaranya :

1. Faktor ekonomi. Pada umumnya mobilitas penduduk karena seseorang ingin merubah taraf hidup menjadi lebih baik. Faktor ekonomi merupakan faktor

terbesar pendorong untuk melakukan mobilitas penduduk untuk bermigrasi meninggalkan tempat tinggal mereka.

2. Faktor pendidikan. Selain faktor ekonomi faktor pendidikanpun salah satu faktor pendorong datangnya para imigran untuk melakukan mobilitas penduduk.
3. Faktor transportasi. Tersedianya sarana transportasi salah satu pendorong mobilitas karena dengan adanya alat transportasi yang lengkap masyarakat bisa lebih mudah untuk akses keluar daerah untuk meningkatkan ekonomi disuatu daerah dan mempermudah orang-orang untuk bekerja atau bersekolah. Dengan demikian maka orang-orang desa akan semakin sering untuk melakukan perjalanan ke kota dengan ongkos murah. Migrasi dari desa ke kota semakin meningkat, karena integrasi desa ke kota semakin baik. Sarana transportasi semakin mudah maka penduduk akan lebih mudah dan akan semakin besar dalam melakukan migrasi kesuatu daerah yang lebih maju.

Faktor penarik mobilitas Everret S.Lee (dalam Aris,2013) mengemukakan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan orang mengambil keputusan untuk melakukan mobilitas penduduk dan adanya rintangan antara kedua faktor tersebut sebagai berikut:

1. Tersedianya lapangan pekerjaan.
2. Kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.
3. Kesempatan yang lebih tinggi memperoleh pendidikan.
4. Keadaan lingkungan yang menyenangkan.
5. Kemajuan di tempat tujuan

Di antara semua faktor penarik adapun faktor pendorong tersebut tentu saja terdapat berbagai rintangan yang dihadapi oleh para pelaku mobilitas. Rintangan tersebut di antaranya dapat berupa rintangan ringan yang biasa diatasi hingga rintangan yang tidak biasa diatasi. Setiap individu memiliki kebutuhan tertentu yang ingin dipenuhi dan memiliki aspirasi yang ingin dapat terlaksana. apabila tempat dimana individu tersebut tinggal tidak dapat memenuhi keinginannya, maka akan menimbulkan tekanan (stress) pada orang tersebut.

Tekanan stress ini dapat berupa tekanan ekonomi maupun psikologi sosial. Ketiga, mobilitas yang berbentuk modal dalam bentuk fisik yang tidak dapat dipindahkan dan dapat mengalami perubahan nilai atau manfaat. Modal dapat mempengaruhi penggunaan aset dan perekonomian wilayah.

Disetiap tempat asal ataupun tujuan, ada sejumlah faktor positif yang menahan orang untuk tetap tinggal di daerah itu dan bahkan menarik orang luar untuk pindah ke tempat tersebut. Sebaliknya, ada sejumlah faktor negatif yang mendorong orang untuk pindah dari suatu tempat dan sejumlah faktor netral yang tidak terjadi masalah dalam keputusan untuk migrasi.

2.2.4.3 Karakteristik Pelaku Migrasi

Motivasi penduduk untuk melakukan migrasi dipahami sebagai harapan untuk meningkatkan kondisi perekonomian rumah tangga yang ditinggalkan. Untuk itu mereka berusaha untuk menekan pengeluaran selama berada di daerah tujuan. Misalnya dengan tinggal di tempat dengan sewa yang murah, bahkan menumpang pada keluarga atau para pelaku migrasi sebelumnya. Jaringan sosial (*networking*) dan kepercayaan (*trust*) terhadap sesama pelaku berkontribusi

positif dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Jaringan sosial (*networking*) dan kepercayaan (*trust*) pada dasarnya merupakan bagian dari modal sosial (Fukuyama, 2000) sehingga, dapat dikatakan pelaku mobilitas sirkuler mempunyai modal sosial yang tinggi terutama mereka yang berasal di daerah asal yang sama.

Salah satu karakteristik pelaku migrasi sirkuler adalah mereka berpendidikan rendah (SD atau SMP) dan didominasi kaum laki-laki. Mereka bekerja di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus. Menurut Lututala (dalam Beguy, 2007) menyatakan bahwa perubahan dalam kehidupan pendidikan, keluarga dan profesional dianggap sebagai alasan utama mengapa orang harus bergerak dari tempat asal ke daerah baru. Lututala (dalam Beguy, 2007) menemukan bahwa sekolah (sekolah menengah dan perguruan tinggi) adalah motif utama migrasi pertama Republik Demokratik Kongo karena, akses pendidikan seringkali jauh dari tempat tinggalnya. Juga ketika lulus dari sekolah menyebabkan orang muda untuk pindah ke daerah lain di mana kesempatan kerja sesuai dengan keahlian mereka. Karakter lain dari pelaku non permanen adalah mempunyai hidup hemat yang lebih kuat. Mereka terpaksa menginap dengan fasilitas seadanya karena upaya menabung atau menyisihkan uang untuk dibawa atau dikirim ke daerah asal. Hal ini sebagai akibat dari alasan mereka pergi dari daerahnya untuk mencari pekerjaan yang dapat meningkatkan kehidupan keluarga.

Conell (dalam Saefullah ,1996) yang menyimpulkan bahwa upaya pelaku mobilitas tersebut merupakan refleksi dari kemiskinan dan sulitnya kesempatan untuk menabung di daerah asal. Karakteristik mobilitas sirkuler adalah :

1. Kelompok penduduk potensial, dimana umumnya pelaku mobilitas sirkuler terdiri dari kelompok umur yang potensial, kebanyakan berumur antara 20 -40 tahun. Orang-orang tersebut masih mempunyai idealis penuh dan semangat dan punya peranan besar dalam kegiatan-kegiatan pembangunan.
2. Dominasi penduduk laki-laki : sebagian besar pelaku mobilitas sirkuler terdiri dari penduduk laki-laki, salah satu faktor yang menyebabkan adalah kehidupan sosial budaya yang menyangkut kebebasan perempuan untuk bepergian hal ini disebabkan juga karena laki-laki dianggap bertanggung jawab terhadap keluarga, mempunyai peluang yang lebih besar untuk melakukan mobilitas sirkuler untuk mencukupi kebutuhan perkenomian keluarga yang ditinggalkan.
3. Pendidikan rendah : akibat pendidikan yang ditamatkan rendah berdampak pada sektor-sektor utama sebagai tujuan para migran, yakni sektor informal. Pekerjaan di sektor informal tidak memerlukan keahlian khusus. Disamping itu mereka dapat keluar masuk dengan mudah untuk mencari pekerjaan yang cocok dan menguntungkan .
4. Kelompok keluarga miskin : dapat dipahami bahwa keputusan untuk melakukan mobilitas sirkuler banyak dipengaruhi faktor ekonomi. Tidak heran jika kebanyakan dari mereka berasal dari kelompok keluarga miskin di daerah asalnya.

5. Bersikap hemat : demi mengumpulkan uang yang semaksimal mungkin di daerah tujuan mereka mengurangi pengeluaran dengan berhemat. Misalnya, tempat tinggal seadanya maupun konsumsi yang minimal. Hal ini ditujukan untuk memaksimalkan penghasilan yang diterima di daerah tujuan guna keperluan remitan (pengiriman ke keluarga yang ditinggalkan).

2.2.4.4. Jenis-Jenis Migrasi

Beberapa jenis migrasi berdasarkan daerah dan waktu pindah, yaitu:

1. Migrasi masuk (*in migration*) adalah perpindahan penduduk ke suatu daerah tempat tujuan (*area of destination*).
2. Migrasi keluar (*out migration*) adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal (*area of origin*).
3. Migrasi neto (*net migration*) merupakan selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar, maka disebut migrasi neto positif, sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk, maka disebut migrasi neto negatif.
4. Migrasi bruto (*gross migration*) adalah jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar.
5. Migrasi risen (*recent migration*) adalah migrasi yang melewati batas provinsi dalam kurun waktu tertentu sebelum pencacahan, misalnya lima tahun sebelum sensus atau survei.
6. Migrasi semasa hidup (*life time migration*) adalah migrasi yang terjadi antara saat lahir dan saat sensus atau survei.
7. Migrasi total (*total migration*) adalah migrasi antar provinsi tanpa memperlihatkan kapan perpindahannya sehingga, provinsi tempat tinggal sebelumnya berbeda dengan provinsi tempat tinggal saat pencacahan. Migrasi pulang (*return migration*) merupakan pengurangan antara migrasi total dan migrasi seumur hidup.
8. Migrasi internasional (*international migration*) merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain.
9. Migrasi parsial (*partial migration*) adalah jumlah migrasi ke suatu daerah tujuan dari suatu daerah asal atau dari daerah asal ke daerah tujuan.
10. Migrasi yang dilihat berdasarkan waktu, yaitu arus migrasi (*migration stream*) yaitu sekelompok migran yang daerah asal dan tujuan migrasinya sama dalam suatu periode migrasi yang diberikan (Moertiningsih, 2010: 135).

2.2.4.5 Ukuran – Ukuran Migrasi

Kejadian atau dinamika migrasi penduduk dapat diukur atas beberapa ukuran sebagaimana ukuran dalam kejadian fertilitas maupun mortalitas, ukuran-ukuran migrasi tersebut adalah (Moertiningsih, 2010):

1. Angka Mobilitas adalah rasio dari banyaknya penduduk yang pindah secara lokal (*mover*) dalam suatu jangka waktu tertentu dengan banyaknya penduduk per seribu perbandingan penduduk yang ada.

$$m = (M/P) k$$

Dimana:

m = angka mobilitas

M = jumlah movers

P = penduduk

$k = 1000$ (nilai konstanta yang menyatakan dari 1000 orang pengamatan)

2. Angka Migrasi Masuk atau *Crude In Migration Rate* (CIMR) Adalah angka yang menunjukkan angka migran yang masuk per seribu orang penduduk daerah tujuan dalam kurun waktu satu tahun.

$$m_i = (M_i / P_i) k$$

Dimana:

m_i = angka migrasi masuk ke wilayah i

M_i = jumlah migrasi masuk (in migration)

P_i = penduduk pertengahan tahun daerah tujuan

$k = 1000$

3. Angka Migrasi Keluar atau *Crude Out Migration Rate* (COMR) Adalah angka yang menunjukkan angka migran yang keluar per seribu orang penduduk daerah asal dalam kurun waktu satu tahun.

$$m_o = (M_o/P_o) k$$

Dimana:

m_o = angka migrasi keluar (out)

M_o = jumlah migrasi keluar (out migration)

P_o = penduduk pertengahan tahun daerah asal

$k = 1000$

4. Angka Migrasi Neto atau Net Migration Rate (NMR) Adalah selisih banyaknya migran masuk dan keluar ke dan dari suatu daerah per seribu penduduk dalam satu tahun.

$$M_n = (M_i - M_o / P) k$$

Dimana:

m_n = angka migrasi neto

M_i = jumlah migrasi masuk (in migration)

M_o = jumlah migrasi keluar (out migration)

P = penduduk pertengahan tahun

$k = 1000$

2.2.5 Pendidikan

Proses pendidikan merupakan upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan generasi muda melalui peningkatan pengetahuan diri dalam menghadapi dunia kerja. Pendidikan bertujuan menghasilkan keluaran langsung dari proses pendidikan dan keluaran jangka panjang dari proses pendidikan. Proses

pendidikan meliputi unsur input, proses, dan output. Agar keluaran pendidikan berkualitas, berbagai unsur input seperti *raw input* (peserta didik) dan instrumental input (kurikulum, sarana prasarana pendidikan, dan guru/tenaga administrasi) diproses dalam pembelajaran secara efisien dan efektif. Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi, semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan dan pembangunan sektor lainnya. Oleh karena itu, anggaran pendidikan di Indonesia cenderung meningkat sampai saat ini.

Pendidikan telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dan kesetaraan akses pendidikan yang berkualitas telah menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan. Melalui pendekatan modal manusia, menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan mengarah pada pembentukan modal manusia sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Melalui pendidikan, orang mengembangkan keterampilan dan menghasilkan pengetahuan yang berubah menjadi peningkatan produktivitas, sehingga pendapatan meningkat dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Selanjutnya, peningkatan pendapatan dan pertumbuhan diharapkan dapat mengurangi kemiskinan.

2.2.5.1 Ketimpangan Pendidikan

Ketimpangan pendidikan merupakan suatu kondisi yang menggambarkan pemerataan pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Ketimpangan pendidikan menjadi sangat penting dalam mengetahui efektifitas dari sistem pendidikan dan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi proses pendidikan. Ketimpangan

pendidikan dapat diakibatkan oleh berbagai macam faktor yang terkait dengan akses terhadap jenjang pendidikan. Menurut Tesfeye (dalam Saifudin,2014) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan yakni :

1. Karakteristik keluarga yang terdiri dari pendapatan, tingkat kesejahteraan, ukuran keluarga, tingkat pendidikan orang tua,
2. Karakteristik anak atau siswa yang terdiri dari tingkat kemampuan siswa, kesehatan, gizi, daya kognitif, dan jenis kelamin,
3. Kualitas pendidikan di antaranya kualitas pengajaran, rasio siswa dan guru, ukuran kelas, kualifikasi guru, kualitas ruang kelas dan peralatan belajar, kurikulum, infrastruktur sekolah dan pemeliharaan rutin, pasokan listrik, fasilitas air minum dan toilet,
4. Tingkat *rate of return* dari pendidikan.

Sementara itu menurut Digdowiseiso (2010), ketimpangan pendidikan di Indonesia dapat diukur dari 4 indikator pendidikan yaitu;

1. Angka partisipasi sekolah,
2. Angka partisipasi murni, Pencapaian pendidikan yakni jumlah siswa yang menyelesaikan beberapa jenjang pendidikan,
3. *Literacy rate*, kemampuan individu para siswa untuk membaca dan menulis.

Negara dengan tingkat ketimpangan pendidikan tinggi secara konsisten menunjukkan tingkat inovasi yang lebih rendah, rendahnya tingkat efisiensi produksi, dan kecenderungan untuk mentransmisi kemiskinan lintas generasi (World Bank 2007). Ketimpangan pendidikan juga dapat diukur dengan

menggunakan indeks gini dan kurva Lorenz. Selain untuk menghitung ketimpangan pendapatan, indeks gini juga dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendidikan, ketimpangan kepemilikan tanah. Indeks gini pendidikan dengan angka berkisar 0 menunjukkan kesetaraan/distribusi sempurna dan jika mendekati angka 1 maka dapat dikatakan ketimpangan yang tinggi.

Digdowiseiso (2010) dalam penelitiannya mengenai ketimpangan pendidikan di Indonesia dari tahun 1999-2005 dengan menggunakan Koefisien gini pendidikan dan kurva Lorenz dalam menganalisa ketimpangan pendidikan berdasarkan aspek area dan gender. Hasilnya menunjukkan bahwa gini pendidikan mengalami penurunan dari 0.35 pada tahun 1999 menjadi 0.32 pada tahun 2005. Penurunan paling drastis terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara dan ketimpangan pendidikan yang rendah terjadi di Provinsi DKI Jakarta serta ketimpangan pendidikan tertinggi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu peneliti lain yaitu Tambunan (2013) meneliti ketimpangan pendidikan di Provinsi Riau, menggunakan indeks gini pendidikan untuk mengetahui ketimpangan pendidikan di Provinsi Riau menggunakan data lama sekolah individu yang diolah dari hasil survei rumah tangga di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa gini pendidikan Provinsi Riau termasuk dalam kategori ketimpangan yang rendah selama periode 2005-2011.

Menurut Schultz (1961) perubahan pada modal manusia merupakan faktor dasar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Proses pendidikan dalam mempengaruhi distribusi pendapatan, melalui peningkatan pengetahuan dan

keahlian tenaga kerja. Hal ini akan menghasilkan pergeseran dari pekerjaan bergaji rendah bagi pekerja tidak terampil ke pekerjaan yang dibayar tinggi bagi pekerja terampil. Pergeseran ini menghasilkan pendapatan pekerja yang lebih tinggi. Peningkatan jumlah orang yang lebih terdidik dan terampil akan mengurangi rasio orang yang kurang berpendidikan dalam angkatan kerja total, sehingga akan mengurangi perbedaan keterampilan.

Hasil penelitian Abdelbaki (2012) dengan menganalisis data pengeluaran rumah tangga dan survei pendapatan di Bahrain, menunjukkan korelasi positif antara tingkat pendidikan tiap kepala keluarga dengan pendapatan keluarga. Keluarga miskin dan daerah miskin mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi, dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak menjadi lebih rendah.

Penyebab ketimpangan pendidikan di Bahrain adalah perbedaan dalam biaya pendidikan, ketersediaan sekolah swasta, dan belanja pemerintah dalam bidang pendidikan. Ketimpangan pendapatan juga diakibatkan oleh bergesernya permintaan tenaga kerja yang tidak terampil menjadi tenaga kerja terampil. Pilihan pekerjaan dan tingkat gaji serta produktivitas di dunia kerja dapat ditentukan dari jenjang pendidikan yang ditempuh. Pendidikan juga dapat menggeser komposisi angkatan kerja jauh dari tidak terampil menjadi terampil yang dalam jangka panjang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan (Schultz, 1961).

Peningkatan ketimpangan pendapatan di Taiwan dapat menyebabkan peningkatan pekerja yang melanjutkan tingkat pendidikan ke yang lebih tinggi.

Sehingga pasokan pekerja terampil akan banyak memasuki pasar tenaga kerja, dari sisi penawaran tenaga kerja terampil diharapkan dalam jangka panjang akan mengurangi ketimpangan pendapatan di Taiwan (Lin, 2006). Pencapaian pendidikan memainkan peran penting sebagai pertanda kemampuan dan produktivitas di pasar kerja. Meskipun pendidikan belum tentu selalu menghasilkan pertanda yang akurat mengenai produktivitas tenaga kerja.

Menurut Abdullah (2011) pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap distribusi pendapatan dimana pendidikan dapat mengurangi perbedaan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin, selain itu ketimpangan pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap terjadinya ketimpangan pendapatan.

Dalam hasil penelitian Checchi (2001) yang menganalisa hubungan ketimpangan pendidikan (rata-rata lama sekolah) dan ketimpangan pendapatan dengan menggunakan indeks gini pendidikan, hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negative terhadap ketimpangan pendapatan. Peningkatan akses pendidikan dapat menurunkan terjadinya ketimpangan pendapatan karena hal ini akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak dan memiliki pendidikan yang tinggi serta didukung oleh peningkatan inovasi teknologi serta lapangan kerja yang memadai maka akan mengurangi terjadinya ketimpangan pendapatan.

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang pertama berjudul “ Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Faktor Faktor yang Mempengaruhi di Kabupaten Banjaregara Tahun 1990-2010 “ oleh Agung Widianarko Eka Nanda Tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Banjarnegara dan menganalisis pengaruh sumbangan masing – masing sektor ekonomi terhadap PDRB perkapita di Kabupaten Banjarnegara, Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa Indeks Williamsons dan juga regresi linier berganda dengan metode *Ordinary least Square* (OLS). Berdasarkan hasil penghirungan dengan rumus Indeks Williamsons selama tahun penelitian di Kabupaten Banjarnegara diketahui tingkat ketimpangan tergolong memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi yaitu 0.52374. kemudian hasil estimasi dengan metode OLS ditemukan bahwa Perubahan PDRB perkapita secara nyata dipengaruhi oleh perubahan dalam sektor pertanian ,sektor industri, sektor bangunan, sektor perdagangan restoran dan hotel, sektor bank dan lembaga keuangan dan sektor jasa –jasa. Pengaruh terbesar terdapat pada sumbangan sektor pertanian. Dari hasil tersebut, penulis menyarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan pembangunan ekonomi yang lebih merata yang mengacu pada kondisi dan potensi daerah Kabupaten Banjarnegara dan memprioritaskan kepada sektor- sektor yang terbukti memiliki pengaruh terhadap PDRB perkapita Kabupaten Banjarnegara dari pada sektor- sektor yang lain.

2. Penelitian yang kedua berjudul “Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Jawa Timur Tahun 2005-2011)” oleh Rama Nurhuda, M. R. Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo tahun 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga apakah hipotesis Kuznets berlaku di wilayah ini dan bagaimanakah pengaruh variabel PDRB, PAD, DAU, dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan. Data dalam penelitian ini menggunakan data tahun 2005-2011. Analisis yang digunakan adalah indeks Wiliamson, hipotesis Kuznets, dan regresi berganda dengan bantuan SPSS. Dari analisis tersebut menghasilkan nilai ketimpangan yang tergolong rendah, dikarenakan nilai Indeks Wiliamson yang mendekati 0. Selain itu, hipotesis Kuznets juga berlaku di provinsi ini. Dari empat variabel di atas, PAD dan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Sedangkan untuk PDRB dan DAU tidak diketahui pengaruhnya dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam uji asumsi klasik.
3. Penelitian yang ketiga berjudul “Analisis Pengaruh Aglomerasi, Tenaga Kerja dan ICOR terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten /kota di DIY periode 2000-2013” oleh Edah Puspitarini tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aglomerasi, tenaga kerja, dan ICOR terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di DIY. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi data panel analisis *fixed effect model* / hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode tahun 2000-2013, variabel aglomerasi dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh

signifikan dan positif. Sedangkan variabel ICOR tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di DIY. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 59,51%. Artinya bahwa variabel independen (aglomerasi, tenaga kerja, dan ICOR) mampu menjelaskan variabel dependen (ketimpangan pendapatan) sebesar 59,51% sedangkan 40,49% sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model.

4. Penelitian yang keempat dengan judul "*Fiscal decentralization, commitment and regional inequality: evidence from state-level cross-sectional data*" Akai dan Sakata (2005). Variabel independen yang digunakan: desentralisasi, GDP Per Kapita, panjang jalan, tingkat metropolitan, tingkat pendidikan, manufaktur, efek politik, investasi, tingkat pengangguran, dan populasi. Variabel dependennya ialah ketimpangan pendapatan.

Alat analisisnya : regresi data panel. Hasil penelitiannya adalah : variabel desentralisasi, GDP per kapita dan tingkat pengangguran signifikan dan berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Variabel panjang jalan, tingkat metropolitan, tingkat pendidikan, manufaktur, dan investasi berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap ketimpangan.

5. Analisis pengaruh pendidikan, infrastruktur jalan dan dana alokasi umum terhadap ketimpangan pendapatan regional kabupaten / kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Ulufun Na'imah tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah *applied research* dengan sifat eksplanatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Entropi Theil dan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan

pendapatan di DIY terus meningkat dari tahun 2007 hingga tahun 2012 dan turun di tahun 2013 kemudian meningkat di tahun 2014. Hal itu dilihat dari nilai rata-rata indeks Entropi Theil DIY. Adapun daerah dengan ketimpangan tertinggi adalah kota Yogyakarta, di mana nilai indeks Entropi Theilnya lebih dari 2,0 selama periode penelitian, variabel yang berpengaruh dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional adalah pendidikan, dengan pengaruh negatif. Sedangkan variabel infrastruktur jalan dan DAU tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan regional.

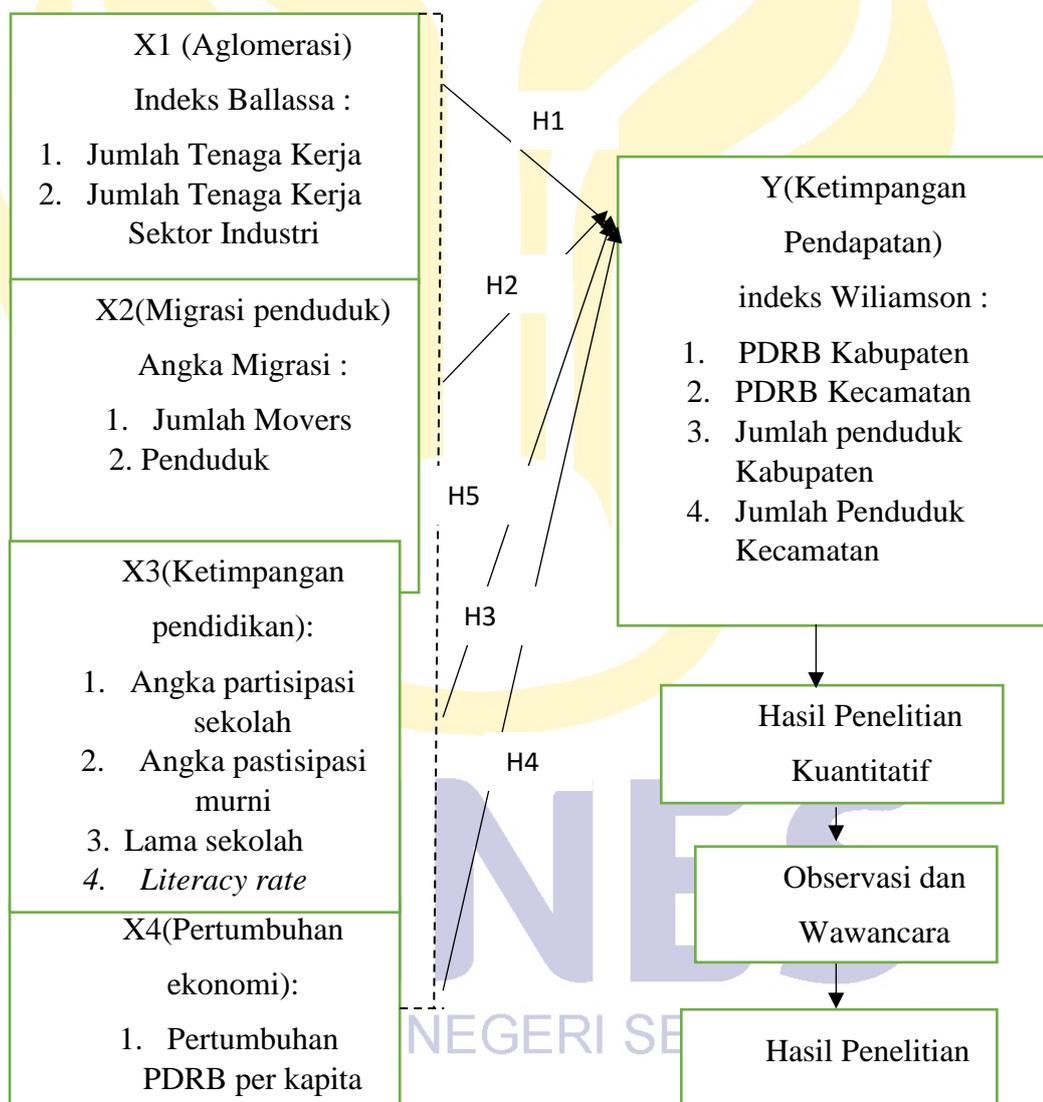
2.4 Kerangka Berfikir

Ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian ini terdiri dari empat variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas tersebut ialah : Aglomerasi sebagai X1 diperoleh dari jumlah tenaga kerja secara keseluruhan dan tenaga kerja sektor industri. Migrasi penduduk sebagai X2 diperoleh dari jumlah *movers* dengan penduduk. Ketimpangan pendidikan X3 dilihat dari, angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, lama sekolah dan *literacy rate*. Pertumbuhan ekonomi sebagai X4 dilihat dari peningkatan PDRB per kapita dimana dicari selisihnya. Variabel terikatnya ialah ketimpangan pendapatan dimana posisi ketimpangan pendapatan sebagai Y dihitung dengan menggunakan PDRB kabupaten, PDRB kecamatan, jumlah penduduk kabupaten, jumlah penduduk kecamatan.

Kerangka di bawah ini menjelaskan tentang penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan pendapatan, pengaruh migrasi penduduk terhadap ketimpangan pendapatan,

pengaruh ketimpangan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan serta pengaruh secara bersama-sama antara variabel independent yaitu X_1, X_2, X_3 dan X_4 terhadap Y . Penelitian ini juga meneliti apa yang menyebabkan salah satu variabel X memiliki pengaruh yang kecil terhadap Y . Penelitian ini juga meneliti apa yang menyebabkan salah satu variabel X memiliki pengaruh yang besar terhadap Y .



Gambar 2.3 Kerangka Berfikir

2.5 Hipotesis Penelitian

1. H1 : Ada pengaruh antara aglomerasi terhadap ketimpangan pendapatan
2. H2: Ada pengaruh antara migrasi penduduk terhadap ketimpangan pendapatan.
3. H3: Ada pengaruh antara kesenjangan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan.
4. H4: Ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan
5. H5: Ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di bab IV maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh positif dan signifikan aglomerasi terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai signifikan kurang dari 0,05 ($0,002 < 0,05$). Besaran pengaruh aglomerasi adalah sebesar 36,1 %. Hal ini berarti semakin tinggi aglomerasi maka semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan.
2. Ada pengaruh positif dan signifikan migrasi terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai signifikan kurang dari 0,025 ($0,025 < 0,05$). Besaran pengaruh migrasi adalah sebesar 20,7 %. Hal ini berarti semakin tinggi migrasi maka semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan.
3. Ada pengaruh positif dan signifikan ketimpangan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai signifikan kurang dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Besaran pengaruh ketimpangan pendidikan adalah sebesar 41,1 %. Hal ini berarti semakin tinggi ketimpangan pendidikan maka semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan.
4. Ada pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai signifikan kurang dari 0,05 ($0,032 < 0,05$). Besaran pengaruh aglomerasi adalah sebesar 19,14 %. Hal ini berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan.

5. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang kecil terhadap ketimpangan pendapatan karena pertumbuhan ekonomi sudah bisa di rasakan oleh semua penduduk di daerah tersebut.
6. Ketimpangan pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap ketimpangan pendapatan karena pendidikan memiliki korelasi yang positif terhadap pendapatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam variabel aglomerasi. Diperlukan peran pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengarahkan lokasi industri. Dalam hal ini pemerintah memiliki instrumen regulasi melalui lokasi peruntukan industri dalam rencana tata ruang wilayah untuk mengarahkan perkembangan lokasi industri. Rencana tata ruang wilayah ini sangatlah penting mengingat letak wilayah sangat mempengaruhi preferensi perusahaan industri.
2. Dalam variabel migrasi. Pemerintah kecamatan bekerjasama dengan pemerintah desa untuk menggiatkan penduduk usia produktif untuk melakukan kegiatan yang mampu meningkatkan kualitasnya sehingga mampu menciptakan lapangan usaha sendiri. Misalnya : pelatihan karang taruna dalam

bidang kewirausahaan. Sehingga, bisa membangun daerahnya sendiri tanpa harus pergi mencari pekerjaan di daerah orang lain.

3. Dalam variabel ketimpangan pendidikan seharusnya berorientasi pada pemerataan pendidikan bukan hanya pada peningkatan pencapaian pendidikan. Diantaranya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dengan penyediaan infrastruktur sekolah untuk daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dan subsidi biaya pendidikan bagi keluarga miskin yang diharapkan dapat membebaskan sebagian besar biaya pendidikan yang selama ini ditanggung oleh siswa.
4. Dalam variabel pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam memelopori dan memfasilitasi lembaga-lembaga usaha yang padat karya sehingga pengembangan ekonomi dapat berorientasi pada peningkatan pendapatan penduduk dan perluasan lapangan pekerjaan. Sehingga, pertumbuhan ekonomi bisa merata mengingat industri adalah penyumbang terbesar pendapatan daerah Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelbaki HH. (2012).” An analysis of income inequality and education inequality in Bahrain”. *Modern Economy Journal*. Scientific Research. 3: 675-685.
- Abdullah AJ. (2011). Education and income inequality: A meta-regression analysis. *.Disertasi*. Malaysia: Universiti Teknologi Mara Sarawak Campus.
- Agusta, Aris. (2013) . *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mobilitas Penduduk Ke Desa Kota Bangun Dua Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara*. *Jurnal Pemerintahan*, Vol.1. Kalimantan Timur : Universitas Mulawarman.
- Akai, Nobuo dan Sakata, Masayo. 2005. *Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence From State Level Cross Section Data For The United States*. *Journal of Urban Economics*, Volume. 52, 93 – 108
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Pemerataan dan Pola Konsumsi Jawa Tengah 2012*. Jawa Tengah: BPS Provinsi Jawa Tengah
- . (2013). *Pemerataan dan Pola Konsumsi Jawa Tengah 2013*. Jawa Tengah: BPS Provinsi Jawa Tengah
- . (2014). *Pemerataan dan Pola Konsumsi Jawa Tengah 2014* . Jawa Tengah: BPS Provinsi Jawa Tengah
- . (2015). *Pemerataan dan Pola Konsumsi Jawa Tengah 2015*. Jawa Tengah: BPS Provinsi Jawa Tengah
- . (2016). *Pemerataan dan Pola Konsumsi Jawa Tengah 2016* . Jawa Tengah: BPS Provinsi Jawa Tengah
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Produk Regional Domestik Bruto 2015*. Banyumas: BPS Banyumas
- . (2016). *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2016*. Banyumas : BPS Banyumas.
- Beguy, Donatien. Philippe Bocquier and Eliya Msiyaphazi Zulu. (2007).”Circular Migration Patterns and Determinants in Nairobi Slum Settlements”. *Demographic Research*: Volume 23, Article 20.

- Bonet, Jamie. (2006). "Fiscal decentralization dan regional income disparities: evidence from the Colombian experience". *Regional Economics Application Laboratory*. USA: University Of Illinois at Urbana-Champaign.
- Checchi D. (2001). "Education, inequality and income inequality". *Discussion Paper . No. DARP 52*. London: London School of Economics.
- Digdowiseiso K.(2009). "Education inequality, economic growth and income inequality; Evidence from Indonesia 1996-2005". *MPRA Paper No. 17792*. Germany: University Library of Munich.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.(2016).*Data Agregrat Penduduk*. Banyumas : Dindukcapil Banyumas.
- Fukuyama, Francis. (2000). "Social Capital and Civil Society". *IMF Working Paper WP/00/74*. IMF Institute.
- Ghozali, Imam.(2016). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : Universitas Diponegoro Semarang.
- Glaeser EL.(2006). "Inequality. Di dalam Barry R Weingast BR, Wittman DA, editor". *The Oxford Handbook of Political Economy*. New York: Oxford University Press Inc.
- Hidayat, Haris.(2014). "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012". *Skripsi*. Semarang : Unniversitas Diponegoro.
- Hugo, Graeme J. 1982. *Circular Migration in Indonesia. Population and Development Review*. Vol 8. No 1 (Mar, 1982) pp 59-83. JSTOR : Amerika.
- Krinantya, Narina. (2014). "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Antarwilayah Di Provinsi Jawa Timur Dan DIY". *Skripsi*. Program S1 Fakultas Ekonomif ka Dan Bisnis.Unniversitas Diponegoro Semarang.
- Kuncoro, Mudrajad.(2004). *Analisis Spasial dan Regional, Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Kuncoro, Mudrajad.(2004). *Analisis Spasial dan Regional, Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN

- Kuncoro, Mudrajad. (2006). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Lin CA. (2006). *Education expansion, educational Inequality and income inequality : Evidence from Taiwan 1976-2003. Social Indicators Research*. 80: 601–615. Taiwan: DOI.
- Mantra, Ida Bagus.(2011). *Demografi Umum edisi kedua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- McCann, Philip. (2001). *Urban and Regional Economics*. New York (US): Oxford University Press.
- Moertiningsih,Sri. (2010). *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Lembaga Demografi UI
- Rama Nurhuda, M. R. Khairul Muluk dan Wima Yudo Prasetyo. (2012). *Analisis Ketimpangan Pembangunan(Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). Jurnal Adminitrasi Publik Volume 1*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Saefullah.(1996). *Mobilitas Internal Non Permanen dalam Mobilitas Penduduk di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Demografi FEUI dan kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN.
- Saifuddin. (2014). “Pengaruh Ketimpangan Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Barat”. *Skripsi*.. Bogor :IPB.
- Schultz TW. (1961). *Investment in human capital. American Economic Review*. 51: 1-17. Amerika : JSTOR.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Tambunan, Tulus. (2001). *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Tambuna, Siswiny. (2013). Analisis Ketimpangan Pendidikan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau. *Skripsi*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Tarigan, R. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P.(2004). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga edisi kedelapan*. Jakarta:Erlangga.
- Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C.(2006). *Pembangunan Ekonom di dunia ketiga edisi kesembilan*.Jakarta: Erlangga.
- Trisianto, Fafan. (2015). “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2012”. *Skripsi*. Jember : Universitas Jember.
- Wodon QT, Yitzhaki S.(2002).*Mobility, Inequality, and Horizontal Equity* .*Jounal Of Economic Literature*: World Bank.
- Widianarko,Agung. (2013). “Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi di Kabupaten Banjarnegara Tahun 1990-2010”. *Skripsi*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- World Bank.(2007). “Investing in Indonesia’s education : Allocation, equity, and efficiency of public expenditures”. *Report Poverty Reduction and Economic Management Unit* : World Bank.